PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Jalan Soekarno-Hatta No. 3 Kota Sawahlunto Kode Pos 27424
Telp (0754) – 61703, 62389, 61107
e-mail : bpkad@sawahluntokota.go

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K j I P)

" TAHUN 2020 "

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak – pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem laporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto periode 2018-2023 yaitu " **Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera"** dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto berada pada **misi ke-4 " menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif** "

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto telah merencanakan dan melaksanakan 5 (lima) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dan sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Sawahlunto dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung pencapaian 3 sasaran dan 50 indikator kinerja (outcome / output) dan 2 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan – hambatan / permasalahan – permasalahan diungkapkan di dalam bab – bab LKjIP ini.

Berbagai keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto tersebut diatas akan tetap dipertahankan dan terhadap kelemahan – kelemahan / hambatan – hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Sawahlunto, Januari 2020
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kota Sawahlunto

AFRIDARMAN, SE
Pembina
NIP. 19730710 200312 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republika Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana mewajibkan setiap Kepala OPD untuk melakukan pengukuran dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 mengacu kepada Revisi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

Rencana Kinerja Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahluno, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2020, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Sawahlunto Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Sawahlunto.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto ini dimaksudkan untuk melaporkan hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi program/kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020.

2. Tujuan

   Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020.

C. Penjelasan Umum Organisasi

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pasal 293 dan pasal 330 mengamanatkan untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah yang kemudian di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk memenuhi maksud Undang-undang tersebut maka dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut terdapat tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yaitu :

A. Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :
   a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
   b. Menyusun rancangan APBD rancangan perubahan APBD
   c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
   d. Melaksanakan fungsi bendaharawan umum daerah
   e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
   f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

B. Selaku Bendaharawan Umum Daerah berwenang:
   a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
   b. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD
   c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran kas
   d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah
   e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanjan Daerah
   f. Menyimpan uang daerah
   g. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
   h. Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi
   i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban kas umum daerah
   j. Menyiapkan pelaksanaan penggunaan dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah
   k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah

C. Selaku Kepala OPD/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas pokok, membantu Walikota dalam penyelenggaraan pelaksanaan dan pengendalian pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pengelolaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
d. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e. Penyelenggaraan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
f. Penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Daerah;
g. Pembinaan pelaksanaan teknis proses pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan asset daerah;
h. Pengesahan dokumentasi pelaksanaan anggaran dan menetapkan penyediaan dana;
i. Penyelenggaraan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis OPD yang berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
j. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
k. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kegiatan Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Kepala BPKAD ..... : Afridarman, SE

Sekretaris BPKAD ..... : Dodi Febrizal, SE.MM

Kepala Bidang Asset ..... : Desismon, S.Kom, M.Kom

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi..... : Rihartanti, SE

Kepala Bidang Anggaran..... : Yofi Aldiana, SE

Kepala Bidang PBB dan BPHTB ..... : Yudaskar, S.Sos

Kepala Bidang Pendapatan ..... : Rizka Nurdin, SE.MM

a. Sekretaris membawahi :

1. Kasubbag Adm Umum & Kepegawaian : Ristina Hidayati, S.Sos
2. Kasubag Adm Keuangan & Pelaporan : Tarmiati, S.Sos, MM

b. Kepala Bidang Asset membawahi :

1. Kasi Pemeliharaan dan Pengamanan Aset : -
2. Kasi Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset : Desmaini, SE.M.Si
3. Kasi Penatausahaan (Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan) : Afrinaldi, S.Sos

c. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membawahi :

1. Kasi Perbendaraan : Herita Harun,SE
2. Kasi Akuntansi dan Pelaporan : Sri Suwartiningsih, SE
3. Kasi Verifikasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah : Eriwisnetty,S.Sos.

d. Kepala Bidang Anggaran membawahi :

1. Kasi Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan : Reno Islami, ST, M.CIO
2. Kasi Anggaran Belanja Langsung : Sulistikawati, SE.M.Si
3. Kasi SIKD : Anaffry Rido, S.Kom

e. Kepala Bidang PBB dan BPHTB membawahi :

1. Kasi Pelayanan dan Penagihan : Vera Silvia,SE.M.Si
2. Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan : Dimas Adre.P, S.Kom

f. Kepala Bidang Pendapatan membawahi :

1. Kasi Pendataan, Analisa dan Pengembangan pendapatan dan Penetapan : Fitri Novita, SE,M.Si
2. Kasi Penagihan : Darmayenni, S.Sos

g. Staf BPKAD Kota Sawahlunto PNS : 21 orang

h. Staf Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah : 5 orang

i. Staf BPKAD Kota Sawahlunto Non PNS : 31 orang

3. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber Daya Aparatur Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto keadaan pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebanyak 79 orang dan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 78 orang dengan golongan sebagai berikut :

Golongan (Pegawai Negeri Sipil / Non PNS)	**Keadaan 2 Januari 2020 (orang)**	**Keadaan 31 Des 2020 (orang)**
PNS Golongan IV	4	4
PNS Golongan III	35	35
PNS Golongan II	8	8
PNS Golongan I	-	-
Pegawai Non PNS	32	31
Jumlah	**79**	**78**

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu :

Pendidikan	Keadaan 2 Januari 2020 (orang)	Keadaan 31 Desember 2020 (orang)
S-3	-	-
S-2	11	11
S-1	39	36
D-III	9	12
D-II	-	-
D-I	-	-
SLTA	19	17
SLTP	1	1
SD	-	1
Jumlah	**79**	**78**

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN :

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Penjelasan Umum Organisasi

D. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran SKPD

C. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2020
- Penghargaan
- Dokumentasi
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (Output) dan hasil (Outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, serta produktif.
Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instnasi pemerintah.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mengacu pada Visi Pemerintah Kota Sawahlunto periode 2018-2023 **" Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera"**

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk Misi. *Misi* adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah sebagai penjabaran visi yang tetah ditetapkan.

Misi Pemerintah Kota Sawahlunto yakni :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK);
3. Mewujdukan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
4. Menghadirkan Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif;
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat;
6. Meningkatkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan;
7. Tersedia infrastruktur publik yang merata dan memadai;
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.
9. Mewujudkan kota berbasis *smart city* dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto berada pada **misi ke-4 " menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif "** yang kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) misi yang yang harus dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), Aparatur dan pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah, manajemen pengelolaan keuangan dan manajemen asset;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas sistem pengelola keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

B. Tujuan, Sasaran OPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi kota dan misi ke-4 yakni menghadirkan pemerintahan yang baik bersih dan inovatif serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi diatas ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Tujuan yang hendak dicapai untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah " **terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel** " Tujuan ini akan menjadi sasaran dalam mewujudkan visi dan visi Pemerintah Kota Sawahlunto.

Adapun sasaran yang harus dicapai sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dengan indikator sasaran sebagai berikut :
   - Persentase capaian realisasi belanja (*quality of budget planning*)
   - Maksimal Defisit APBD
   - Persentase capaian realisasi anggaran
   - Persentase capaian realisasi belanja modal (*quality of spending*) bidang Pendidikan .
   - Persenatase capaian realisasi belanja modal (*quality of spending*) bidang Kesehatan.

2. Mengelola Pendapatan Daerah dengan indikator persentase capaian realisasi pendapatan (*fiscal space*)
3. Mengelola Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dengan indikator persentase OPD dengan laporan BMD yang akurat dan akuntabel.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instasni yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Melalui Perjanjian Kinerja akan terwujudnya komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dimana kinerja tersebut tidak dibatasi pada pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan disusunya Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja selanjutnya akan diterjemahkan dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto selama tahun 2020, target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama satu tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Perjanjian Kinerja dan Rencana kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020 secara lengkap disajikan pada lampiran Laporan ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah melaksanakan fungsi pokoknya yakni membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto harus dapat mengaplikasikan aturan yang ada, sehingga keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah juga mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023. Walaupun keberhasilan pencapaian sasaran ini jika dihitung berdasarkan indikator keberhasilan pencapaian belum mencapai 100%.

Dari beberapa sasaran yang telah dicapai masih terdapat perbendaan antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini tampak pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran masih pada tingkat output, padahal yang menjadi harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada tingkat outcome.

Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pencapaian Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2020

No	Sasaran Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Pencapaian	
		Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4
1.	Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	√	
	- Persentase Capaian realisasi Belanja (*quality of budget planning*)	√	
	- Maksimal defisit	√	
	- Persentase Capaian realisasi anggaran	√	
	- Persentase Capaian realisasi belanja modal (*quality of spendding*) Bidang Pendidikan	√	
	- Persentase Capaian realisasi belanja modal (*quality of spendding*) Bidang Kesehatan	√	
2.	Mengelola Pendapatan Daerah	√	
	- Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (*Fiscal Space*)	√	
3.	Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	√	
	- Persentase OPD dengan laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel	√	

Tabel

PERBANDINGAN ANTAR TARGET DAN REALISASI KINERJA 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan (DO)	Rumus Penghitungan Indikator/Definisi Operasional	Target Capaian Setiap Tahun				Sumber Data	Penanggung jawab
							2019	Realisasi	2020	Realisasi		
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	1.	Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Opini BPK terhadap Laporan - Persentase Capaian realisasi Belanja (Quality of Budget planning)	%	- Realisasi belanja APBD / Pagu Belanja APBD x 100 - 544,263,658,204.79 / 607,599,970,457.65 x 100 89.58%	WTP 90%	97.78%	WTP 90%	99.53%	BPKAD BPKAD	BPKAD Bidang Anggaran
				- Maksimal Defisit APBD		- Realisasi Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) / Total belanja x 100 - 44,069,104,695.58 / 607,599,970,457.65 x 100 7.25%	0%	0%	0%	0%	BPKAD	
				- Persentase Capaian realisasi anggaran	%	- Realisasi Anggaran / Target Anggaran x 100 - 590,251,429,567.03 / 610,016,637,124.31 x 100 96.76%	85%	105%	85%	113.82%		
				- Persentase Capaian realisasi belanja modal (Quality of spendding) Bidang Pendidikan	%	- Realisasi Realisasi Belanja Modal Bidang Pendidikan / Realisasi Realisasi Belanja Pendidikan x 100 - 11,255,336,398.00 / 113,200,032,720.00 x 100 9.94%	20%	10.55%	10%	9.94%		Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

		- Persentase Capaian realisasi belanja modal (Quality of spendding) Bidang Kesehatan	%	- Realisasi Realisasi Belanja Modal Bidang Kesehatan / Realisasi Realisasi Belanja Kesehatan x 100 - 22,218,802,353.00 / 136,163,815,984.82 x 100 16.32%	10%	9.79%	10%	16.32%		
2.	Mengelola Pendapatan Daerah	- Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiscal Space)	%	- Realisasi Pendapatan Daerah / Target Pendapatan Daerah x 100 - 576,968,762,338.56 / 587,598,325,124.00 x 100 98.19%	95%	95.20%	95%	98.19%	BPKAD	Bidang Pendapatan
			%	- Realisasi (PBB + BPHTB) / Realisasi PAD x 100 - 1,682,207,103.00 / 59,537,385,897.66 x 100 2.83%	2.5%	2.39%	2.5%	2.83%	BPKAD	Bidang PBB
3.	Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	- Persentase OPD dengan laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel	%	- Laporan BMD OPD yang akurat dan Akuntabel / Jumlah OPD x 100 - 23 / 26 x 100 88.46%	91%	88.46%	92%	88.46%	BPKAD	Bidang Aset

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dalam pencapaian program Tahun 2020 diukur berdasarkan kinerja keluaran. Dengan demikian walaupun secara teoritis capaian program diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada kinerja hasil, namun pengukuran berdasarkan kinerja hasil tersebut masih belum optimal dan kinerja pada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat terlihat kinerjanya. Dengan alasan tersebut maka capaian program diukur berdasarkan kinerja keluaran.

Untuk lebih jelasnya capaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Sasaran Strategis

Mengelola keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, sebuah daerah dapat dikatakan mandiri apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, dimana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut tampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 meliputi arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan daerah Tahun 2020. Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang paling strategis diupayakan adalah tertutupinya defisit belanja setiap tahunnya atau setidaknya terjadinya penurunan defisit daerah dibanding tahun sebelumnya.

Penurunan defisit daerah ini terutama diupayakan melalui peningkatan pendapatan daerah disamping melakukan upaya efisiensi dan rasionalisasi pengeluaran daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan publik yang harus dipenuhi.

3.1.1 Indikator Kinerja

Persentase capaian realisasi belanja (*Quality of Budget Planning*)

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020.

Indikator kinerja	Formula Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase capaian realisasi belanja (*Quality of Budget Planning*)	Realisasi Belanja APBD x 100% / Pagu Belanja APBD	90%	89,58%	99,53%

Pengukuran Kinerja

= Rp.554.263.658.204,79 x 100%
Rp.607.599.970.457,65

= 89,58 %

Untuk Belanja secara umum realisasi belanja APBD Kota Sawahlunto tahun anggaran 2020 berjumlah Rp.544.263.658.204,79 dari yang dianggarkan sebesar Rp 607.599.970.457,65 atau 89, 58%. Komposisi realisasi belanja di Tahun 2020 secara garis besar dibagi tiga, yaitu belanja operasi dan belanja modal serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bobot (%)
Belanja Operasi	432.041.894.181,65	397.517.138.143.22	92,01
Belanja Modal	80.646.242.152, 00	63.699.147.392,57	78, 99
Belanja Transfer	67.371.834.124,00	67.371.834.124,00	100
Belanja Tidak Terduga	27.540.000.000,00	15.675.538.545,00	56, 92
Jumlah	**607.599.970.457,65**	**544.263.658.204,79**	**89,58**

Komposisi masing-masing belanja sebagian besar diserap oleh Belanja Operasi yang mencapai 92,01% dan Belanja Modal mencapai 78,99%, dan Belanja Transfer mencapai 100% dan Belanja Tidak Terduga mencapai 56, 92%.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan OPD, maka jumlah realisasi belanja untuk tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

No	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	118,259,517,529.00	110,188,242,814.00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	75,231,901,123.00	71,249,952,915.82
3	RSUD/ BLUD	69,095,348,716.86	65,026,808,569.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23,271,999,568.30	21,229,131,873.09
5	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	18,377,630,676.90	16,439,647,869.56
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8,071,985,758.18	7,821,205,515.00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyakat,Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	6,087,823,688.00	5,646,910,737.00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	12,960,923,786.00	12,545,838,861.00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3,622,343,182.00	3,393,390,326.00
10	Dinas Perhubungan	4,970,869,301.25	4,405,890,271.00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7,124,519,146.05	6,501,330,707.00
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5,287,729,152.00	4,882,790,396.00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,959,810,205.81	2,843,025,036.00
14	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Museum	6,144,020,379.00	5,813,446,541.00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	10,116,300,711.50	9,072,711,659.00
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5,332,607,082.00	4,842,620,443.00

No	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10,135,191,007.00	9,749,361,431.00
18	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,410,940,111.00	6,640,676,452.00
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	17,490,357,050.00	6,026,892,488.00
20	PPKD	102,956,934,124.00	90,459,289,231.72
21	Inspektorat	5,046,119,539.00	4,849,533,556.00
22	Sekretariat Daerah	29,695,735,285.00	27,081,598,242.00
23	Sekretariat DPRD	20,596,888,196.00	17,755,313,849.00
24	Walikota dan Wakil Walikota	575,893,002.00	542,585,377.00
25	DPRD	6,650,562,500.00	6,148,050,516.00
26	Kecamatan Barangin	9,731,033,836.00	8,056,329,100.00
27	Kecamatan Lembah Segar	13,505,333,459.30	10,633,659,460.60
28	Kecamatan Silungkang	2,406,459,792.50	2,259,712,431.00
29	Kecamatan Talawi	2,255,919,800.00	2,157,711,537.00
	Jumlah	**605,372,697,707.65**	**544,263,658,204.79**

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra.

Capaian indikator kinerja tahun 2020 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2020 dapat dilihat dari table berikut ini :

Indikator kinerja	Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi belanja (*Quality of Budget Planning*)	97,98%	90%	89,58%	99,53%	90%	99,53%

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun 2020 merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengintegrasikan dan menyelaraskan antara program pemerintah, program provinsi dan program Kota Sawahlunto yang dalam penyusunannya didasarkan pada penjaringan aspirasi masyarakat yang dipadukan dengan program dari SKPD di lingkungan pemerintah kota.

APBD juga mencerminkan besaran pengalokasian anggaran dari setiap kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan pmerintahan dan menjalankan roda pembangunan daerah sebagai kelanjutan dari program pembangunan tahun sebelumnya.

Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.

Prioritas belanja diarahkan pada pendanaan bagi program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahunto Nomor 5 Tahun 2019 pada 14 bidang, yakni:

a. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan daya saing.
b. Pengembangan sektor kepariwisataan Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan daya saing.
c. Pengembangan infrastruktur yang adil dan merata.
d. Peningkatan kesalehan sosial melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budi pekerti.
e. Menjalin kehidupan sosial yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan berbeda agama.
f. Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter.
g. Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.
h. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
i. Lanjutan sapu bersih kemiskinan.
j. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan disemua bidang dan terjaminnya keteraan gender.
k. Peningkatan kualitas olahraga dan pembinaan kepemudaan.
l. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang.
m. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah.
n. Perluasan jaringan sosial, ekonomi secara nasional dan internasional.

Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena kebijakaan pembangunan daerah pada tahun 2020 harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan regulasi penggunaan angaran sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 dengan mempedomani hal sebagai berikut:

a. Anggaran berbasis kinerja

Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.

b. Anggaran Pendidikan minimal 20%

Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2020 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS).

Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

c. Anggaran Kesehatan minimal 10%

Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, tentang kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.

d. *Fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost*

Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:

1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);

2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tupoksi OPD, meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan;

3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD.

e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Prioritas Pembangunan

Kebijakan pembangunan Tahun 2020 diarahkan untuk mempercepat mewujudkan visi kota dengan kebersamaan kita wujudkan Sawahlunto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera, dan pengembangan ekonomi kerakyatan berkelanjutan dan sejalan dengan program nasional maka strategi dan prioritas pembangunan Tahun 2020 meliputi:

1) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan daya saing.

Mengembangkan ekonomi kerakyatan masih tetap diarahkan pada pengembangan pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sekaligus dalam mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan bibit, pemberdayaan petani dan penyuluh, penerapan teknologi dan manajemen usaha tani, jaringan irigasi desa serta pembukaan jalan sentra produksi.

Peningkatan nilai tambah dari produksi kakao melalui penumbuhan dan pengembangan industri kecil pengolahan biji kakao menjadi produk makanan dan bahan makanan. Disamping itu perluasan basis produksi dan pengembangan tenun songket tetap dijadikan salah satu andalan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengembangan sentra industri kaos dan pakaian olahraga juga merupakan salah satu kebijakan di Tahun 2020.

2) Pengembangan infrastruktur yang adil dan merata

Penyediaan infrastruktur dasar sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi dan interaksi sosial masyarakat, karena itu untuk mendorong perkembangan wilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur menjadi prioritas utama.

Pembangunan infrastruktur diarahkan guna mewujudkan infrastruktur kota yang mencukupi sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi warga kota dalam beraktivitas dan wisatawan yang datang berkunjung dengan memprioritaskan kepada memelihara dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan, penyediaan Moda transportasi yang memadai, aman dan nyaman, meningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi meningkatan kualitas perumahan warga kurang mampu, penyediaan fasilitas sosial dan pemerintah, peningkatan pengelolaan persampahan, perbaikan prasarana sarana dan utilitas permukinan, pengelolaan ruang terbuka hijau dan penyediaan fasilitas penerangan jalan umum, pengelolaan sumberdaya air bagi kepentingan irigasi dan air minum, membangunan infrastruktur penunjang kepariwisataan.

Namun pembangunan sarana air limbah perkotaan, infrastruktur kepariwisataan, kualitas jalan dan jembatan, sarana pemerintahan Desa/Kelurahan dan penyediaan sarana olahraga memperoleh porsi lebih besar dari tahun sebelumnya.
Melalui pembangunan infrastruktur yang terinegritas diharapkan tercipta pertumbuhan yang seimbang antara pembangunan perkotaan dengan pengembangan perdesaan.

3) Peningkatan Kesalehan Sosial melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat dan Budi Pekerti
   Pembinaan kehidupan beragama ditujukan untuk meningkatkan pengamalan ajaran beragama ditengah kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan suasana religius.

   Hal ini dapat tercermin dari peningkatan kualitas dan intensitas peribadatan, pendidikan keagamaan yang berkembang, toleransi antar umat beragama dan terciptanya suasana yang kondusif untuk melaksanakan ibadah dan perayaan hari besar keagamaan serta ditunjang oleh keberadaan tokoh agama selaku pembinaan dan pembimbing spritual.
   Pelestarian nilai budaya tetap diarahkan pada upaya untuk menjaga kelestarian adat istiadat, kesenian dan seluruh produk kebudayaan yang tumbuh, hidup dan berkembang di Kota Sawahlunto. Peningkatan pemahaman nilai budaya dan kepedulian terhadap adat istiadat di kalangan generasi muda masih merupakan sasaran yang hendak dicapai.

4) Menjalin kehidupan sosial yang harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan berbeda agama
   Keragaman budaya, etnis dan agama yang ada di Kota Sawahlunto merupakan aset bagi daerah.

Melalui pangelaran budaya dan pembinaan keagamaan dalam Forum Koordinasi umat beragama (FKUB) kehidupan sosial uang harmonis antar umat beragama dan budaya di Kota Sawahlunto dapat terus dijalin dan dibina.

5) Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter

Peningkatan kualitas pendidikan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas lulusan setiap jenjang pendidikan yang memiliki kompetensi di bidangnya agar mampu bersaing dan meneruskan pendidikan pada tingkat lebih tinggi sehingga angka rata-rata lama sekolah dapat meningkat. Penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran dan dibantu dengan suasana belajar yang kondusif menjadi perhatian utama.

Pencegahan dan pengurangan angka putus sekolah juga masih merupakan salah satu isu utama yang harus ditangani melalui pemberian beasiswa dan program wajib belajar 12 tahun serta peluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat.

Disamping hal tersebut diatas untu membentuk siswa yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual semata tetapi juga diimbangi denga kecerdasan emosional dan spritual dapat diwujudkan melalui penerapan pendidikan berkarakter. Pembinaan generasi muda melalui aktivitas olahraga dan seni merupakan sebagian dari upaya pembentukan karakter pemuda.

6) Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM

Menciptakan keaman dan ketertiban yang kondisif di Kota Sawahlunto, kerja sama antar Pemerintah Kota Sawahlunto.

Institusi keamanan dan tokoh masyarakat. Peran serta tokoh masyarakat sangat penting dalam mencegah aktifitas yang melanggar hukum serta menegakan supremasi hukum dan HAM ditengah masyarakat.

7) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualtas pelayanan kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diutamakan melalui upaya preventif melalui pembiasaan pola hidup bersih dan sehat yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dari tingkat bawah seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Tingkat PAUD.

Perlindungan dan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan pola subsidi akan terus dilanjutkan, begitu juga dengan penataan sistim rujukan guna mendukung pelaksanaan BPJS kesehatan secara Nasional.

Dalam pelayanan kesehatan baik pada tingkat layanan dasar di Puskesmas maupun layanan lanjutan di Rumah Sakit perlu terus ditingkatkan sumberdaya manusia tenaga medis, peningkatan fasilitas pelayanan serta memenuhi peralatan kedokteran yang dibutuhkan.

Upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan, mengurangi angka kematian bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular akan terus dilanjutkan. Di samping itu perbaikan sanitasi dan penyediaan air minum yang layak juga menjadi prioritas utama

8) Lanjutan sapu bersih kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Tahun 2020 diarahkan pada penggunaan satu data tunggal hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2016 yang proses pendataannya melibatkan unsur pemerintah terdepan dan

unsur masyarakat sehingga diharapkan semua *stakeholders* penanggung jawab penanggulangan kemiskinan dapat fokus untuk bergerak bersama-sama dalam menanggulangi kemiskinan dengan satu data yang disepakati di tingkat kota.

Di samping itu juga akan diaplikasikan pendekatan Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan (PPK) dalam proses perencanaan program/kegiatan. Beberapa program/kegiatan yang berpotensi memiliki sasaran Rumah Tangga Miskin akan diidentifikasi dan secara kuantitatif ditentukan berapa alokasi dari manfaat program/kegiatan tersebut yang memiliki sasaran individu atau RumahTangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Penanggulangan Kemiskinan.

9) Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender.

Peran serta perempuan dalam pembangunan tidak bisa kita abaikan untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap kaum perempuan baik dalam kehidupan sosial maupundalam berpolitik.

Kesetaraan gender bukanlah hal baru dalam pemerintahan di Kota Sawahlunto. Namun untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kesetaraan gender ini, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki.Peningkatan kualitas olahraga dan pembinaan kepemudaan.

10) Peningkatan kualitas olahraga dan pembinaan kepemudaan

Saat ini, kegiatan keolahragaan sangat digalakan oleh pemerintah Kota Sawahlunto. Untuk menghidupkan kembali kegiatan olahraga masyarakat dan memasyarakatkan olahraga berbagai event telah dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.

11) Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Sawahlunto menyiapkan langkah-langkah penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efesien. Aparatur sipil negara sebagai pemegang peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

Menyempurnakan sistim organisasi dan tata kerja yang efektif dan efesien serta membuat ruangan pelayanan yang representif diseluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

12) Pengembangan sektor kepariwisataan

Pengembangan kepariwisata diutamakan untuk menggali dan merencanakan objek pariwisata yang potensial baik secara kualitas maupun kuantitas. Potensi ini berupa sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan warisan seni dan budaya.

Tahun 2020 ditetapkan kebijakan Akselerasi pengembangan pariwisata Kota Sawahlunto dengan memperioritaskan: Persiapan menuju kota Kreatif, Pengembangan *MICE tourism (Meeting (M), Incentive (I), Conference (C), Event (E)*), pengembangan *heritage tourism* kawasan kota lama, pengembangan manajemen tata ruang yang mengacu pada nilai konservasi dan pelestarian, pengembangan aktivitas pariwisata yang mampu menciptakan mata rantai nilai tambah yang tinggi, peningkatan mutu rumah makan/restoran dan akomodasi, peningkatan promosi wisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam aktivitas wisata.

13) Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah

Percepatan pembangunan Kota Sawahlunto dilakukan dengan mengintesifkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta pihak ketiga dalam rangka membantu pembangunan sarana dan prasarana serta menanam investasi sesuai potensi yang dimiliki Kota Sawahlunto.

14) Perluasan jaringan sosial, ekonomi secara nasional dan internasional

Perluasan kerjasama ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto dengan melakukan kerjasama denga Kota/Kabupaten lainnya baik secara ekonomi dan sosial serta melakukan peningkatan promosi produk lokal Kota Sawahlunto melalui media.

Empat belas program prioritas pembangunan di Kota Sawahlunto telah selaras untuk mendukung program prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional.

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 merupakan tahun empat dari RPJMD 2016 – 2021. Untuk Rencana Prioritas Pembangunan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan prioritas pembangunan pada tahun sebelumnya yakni tetap 10 prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Pembangunan mental dan pengamalan agama serta ABS SBK dalam kehidupan masyarakat.
b. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
c. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
e. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
f. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, UMKM dan Koperasi serta investasi.
g. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.

h. Penurunan tingkat kemiskina dan pengangguran serta daerah tertinggal.
i. Pengembangan energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
j. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2020 disusun sebagai pejabaran operasional dari strategi pembangunan nasional dalam upaya melaksanakan agenda pembangunan nasional yang dirumuskan dalam RPJMN yaitu:

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis.
c. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
f. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.
g. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Sawahlunto merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp 587.598.325.124,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 57.525.368.782,00, Pendapatan Transfer Rp. 460.437.498.175,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah senilai Rp 69.635.458167,00.

Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp 607.599.970.457,65

Kekurangan dana untuk membiayai belanja dan transfer selama tahun 2020 akan didanai dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu senilai Rp.11.518.993.036,72 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp.10.899.318.963,59 dan dikurangi dengan rencana pengeluaran pembiayaan senilai Rp.2.416.666.666 yang diperuntukkan bagi Penyertaan modal Rp. 1.250.000.000,00 dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri Rp. 1.166.666.666,66

Pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun Anggaran 2020 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang melebihi pendapatan yang ditargetkan diterima di tahun 2020. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut :

Tabel Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan TA 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4	5=(4/3)*100
A.	**Pendapatan**			
1	Pendapatan Asli Daerah	57.525.368.782,00	59.537.385.897,66	103, 50
2	Dana Perimbangan Transfer Pusat	460.437.498.175,00	445.561.937.322,00	96, 77
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	69.635.458.167,00	71.869.439.118,90	103, 21
	Jumlah Pendapatan TA 2020 (A)	**587.598.325.124,00**	**576.968.762.338,56**	**98, 19**
B.	**Belanja dan Transfer**			
1	Belanja Operasi	432.041.894.181,65	397.517.138.143.22	92,01
2	Belanja Modal	80.646.242.152,00	63.699.147.392,57	78, 99
3	Belanja Tak Terduga	27.540.000.000,00	15.675.538.545,00	56, 92
4	Belanja Transfer	67.371.834.124,00	67.371.834.124,00	100
	Jumlah Belanja TA 2020(B)	**607.599.970.457,65**	**544.263.658.204,79**	**89,58**
C.	**Surplus/(Defisit) TA 2020 (A-B)**	**(20.001.645.333,65)**	**32.705.104.133,77**	**(163,51)**
D.	**Pembiayaan**			
1	Penerimaan	22.418.312.000,31	13.282.667.228,47	59, 25
2	Pengeluaran	2.416.666.666,66	1.918.666.666,66	79, 39
	Pembiayaan Netto (D)	**20.0001.645.333.65**	**11.364.000.561,81**	**56,82**
E.	**SiLPA (C+D)**	**0,00**	**44.069.104.695.58**	

Dampak terhadap pengelolaan Keuangan daerah :

Realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai 100%, maka pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Sawahlunto harus berupaya maksimal dalam menggenjot tingkat penerimaan pendapatan, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer.

Salah satu target penerimaan transfer yang belum berhasil diperoleh pada tahun 2020 yaitu Dana Insentif Daerah (DID). Pada penyusunan APBD Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto menargetkan penerimaan DID pada KUA -PPAS sebesar Rp.27.500.000.000. Namun target ini tidak dapat terealisasi karena Kota Sawahlunto belum dapat memenuhi nilai ambang batas yakni 76 (B).

Dengan tidak menerimanya DID sebesar Rp. 27.500.000.000.00 mengakibatkan terdapat program kegiatan yang tidak bisa dianggarkan pada tahun anggaran 2020 dan melakukan efisiensi belanja dikarenakan jumlah defisit yang cukup besar. Apabila Pemko Sawahlunto tidak melakukan upaya untuk peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, maka dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap pengelolaan keuangan daerah.

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Indikator penggunaan sumber daya	Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi belanja (*quality of budget planning*)	90,86%	85%	96,76%	113.82%	85%	113.82%

= Realisasi Anggaran x 100
Target Anggaran

= Rp. 590.251.429.567,03 x 100 %
Rp.610.016.637.124,31

= 96,76 %

Dalam pengelolaan Keuangan Daerah, proses penatausahaan belanja memiliki peran yang cukup penting dalam efisiensi serta efektifitas pelaksanaan APBD. Meskipun pendapatan meningkat secara signifikan, tetapi jika tidak didukung perbaikan aspek pengeluaran (belanja) maka progress program pembangunan akan stagnan bahkan cenderung pada kemunduran. Oleh karena itu, pengendalian terhadap penatausahaan belanja harus dilaksanakan dengan baik mulai dari proses penganggaran, perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban pasca kegiatan.

Pengendalian penatausahaan ini bertujuan agar setiap proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai target dan tepat sasaran, baik dari aspek pelaksanaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Umumnya hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, yakni:

a. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah melakukan pergeseran anggaran.
b. Adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya karena kondisi alam yang tidak diinginkan, seperti bencana alam.
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.
d. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

Sedangkan pengendalian belanja dapat dilakukan antara lain dengan:

a. Sinkronisasi kegiatan yang sejenis dan saling mendukung di masing-masing OPD untuk pemborosan karena kegiatan yang tumpang tindih. Sikronisasi dapat dilaksanakan melalaui pelaksanaan musrenbang yang lebih akuntabel.
b. Harmonisasi standar belanja dan sub rekening belanja kegiatan sejenis di masing-masing OPD dengan prinsip dasar efisiensi dan ekonomis.
c. Mengefektifkan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto tanpa intervensi negatif dari pihak manapun.
d. Menatausahakan pencairan, verifikasi, pelaporan kegiatan yang lebih akuntabel dan lebih sederhana
e. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

3.1.2 Indikator Kinerja

Maksimal Defisit APBD

a. Perbandingan antara target dan realisasi defisit tahun 2020

Indikator defisit APBD	Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi defisit	1,91	0	7.25	0	0	0

$$= \frac{\text{Realisasi SILPA}}{\text{Total Belanja}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{44.069.104.695,58}{607.599.970.457,65} \times 100\ \%$$

$$= 7.25\ \%$$

Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun 2020 mengalami **surplus** dari kegiatan anggaran sebesar Rp 32.705.104.133,77.

a. Pembiayaan Netto

Jumlah pembiayaan netto Tahun 2020 adalah sebesar Rp 20.001.645.333,65 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp.22.418.312.000,31 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.416.666.666,66

b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh SiLPA Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 44.069.104.695,58 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas pada Kas Daerah	Rp.	39.468.236.451,60
2) Penerimaaan RSUD tahun lalu	Rp.	2.816.641,00
3) Kas pada BLUD	Rp.	2.848.498.103,98
4) Kas JKN	Rp.	831.788.689,00
5) Kas BOS	Rp	917.764.810,00

1.1.3 Indikator Kinerja

Persentase capaian realisasi anggaran

Indikator kinerja anggaran	Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi anggaran	105%	85%	96,76%	113.82%	85%	100%

= Realisasi Anggaran x 100
Target Anggaran

= Rp. 590.251.429.567,03 x 100 %
Rp.610.016.637.124,31

= 96,76 %

Data Dukung :

No	Uraian	Target Anggaran	Realisasi anggaran
1.	Pendapatan-LRA	587.598.325.124,00	576.968.762.338,56
2.	Penerimaan Pembiayaan	22.418.312.000,31	13.282.667.228,47
	Jumlah.....>	610.016.637.124.31	590.251.429.567.03

3.1.4. Indikator Kinerja

Persentase capaian realisasi belanja modal (*quality of spendding*) bidang pendidikan

Persentase capaian realisasi anggaran

Indikator kinerja anggaran	Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi anggaran	10,55%	20%	9,94%	49,71%	20%	49,71%

= Realisasi Belanja Modal Bidang Pendidikan x 100 %
Realisasi Belanja Pendidikan

= Rp. 11.255.336.398,00 x 100%
Rp. 113.200.032.710,00

= 9,94%

Data Dukung :

No	Uraian	Realisasi anggaran
1.	Belanja Modal Bidang Pendidikan dengan rincian sebagaimana terlampir	11.255.336.398
2.	Realisasi Belanja Pendidikan :	**113.200.032.720**
	- Pendidikan	110.186.242.814
	- Kepemudaan dan olah raga	271.250.000
	- Perpustakaan	2.742.539.906

3.1.5 Indikator Kinerja

Persentase capaian realisasi belanja modal (*quality of spendding*) bidang kesehatan .

Persentase capaian realisasi anggaran

Indikator kinerja anggaran	Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi anggaran	9,79%	10%	16,32%	163,18%	10%	100%

= Realisasi Belanja Modal Kesehatan x 100 %
Realisasi Belanja Kesehatan

= 22. 218. 802. 353 x 100 %
136.163.815.984.82

= 16,32 %

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban
Nomor : -
Tanggal :

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	JENIS BELANJA		JUMLAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		(Rp)	(%)
1	2		3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		7.234.995.000,00	12.477.503.277,00	11.255.336.398,00	30.967.834.675,00	(960.115.039,00)	96,90
			7.207.484.400,00	12.036.038.565,00	10.764.196.671,00	30.007.719.636,00		
1.01	**Pendidikan**		7.234.995.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.965.834.675,00	(960.115.039,00)	96,90
			7.207.484.400,00	12.034.038.565,00	10.764.196.671,00	30.005.719.636,00		
1.01 . 1.01.01	**Dinas Pendidikan**		7.234.995.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.965.834.675,00	(960.115.039,00)	96,90
			7.207.484.400,00	12.034.038.565,00	10.764.196.671,00	30.005.719.636,00		
1.01 . 1.01.01 . 01	**Dinas Pendidikan**		7.234.995.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.965.834.675,00	(960.115.039,00)	96,90
			7.207.484.400,00	12.034.038.565,00	10.764.196.671,00	30.005.719.636,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***		7.164.525.000,00	1.010.356.755,00	0,00	8.174.881.755,00	(144.098.439,00)	98,24
			7.163.884.400,00	866.898.916,00	0,00	8.030.783.316,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(1.312.000,00)	56,27
			0,00	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		0,00	71.400.000,00	0,00	71.400.000,00	(7.766.354,00)	89,12
			0,00	63.633.646,00	0,00	63.633.646,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	(7.400,00)	99,95
			0,00	14.492.600,00	0,00	14.492.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		0,00	130.539.000,00	0,00	130.539.000,00	(1.257,00)	100,00
			0,00	130.537.743,00	0,00	130.537.743,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		0,00	298.099.005,00	0,00	298.099.005,00	(102.909.730,00)	65,48
			0,00	195.189.275,00	0,00	195.189.275,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	18.615.000,00	0,00	18.615.000,00	0,00	100,00
		0,00	18.615.000,00	0,00	18.615.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	180.078.750,00	0,00	180.078.750,00	(26.276.250,00)	85,41
		0,00	153.802.500,00	0,00	153.802.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	195.625.000,00	0,00	195.625.000,00	(4.764.148,00)	97,56
		0,00	190.860.852,00	0,00	190.860.852,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	6.319.725.000,00	91.000.000,00	0,00	6.410.725.000,00	(857.300,00)	99,99
		6.319.284.400,00	90.583.300,00	0,00	6.409.867.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	844.800.000,00	0,00	0,00	844.800.000,00	(200.000,00)	99,98
		844.600.000,00	0,00	0,00	844.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	(4.000,00)	99,95
		0,00	7.496.000,00	0,00	7.496.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	***Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur***	0,00	214.201.500,00	18.000.000,00	232.201.500,00	(7.307.086,00)	96,85
		0,00	207.008.414,00	17.886.000,00	224.894.414,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(100.000,00)	99,00
		0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	12.453.300,00	0,00	12.453.300,00	0,00	100,00
		0,00	12.453.300,00	0,00	12.453.300,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	127.675.300,00	0,00	127.675.300,00	(2.636.887,00)	97,93
		0,00	125.038.413,00	0,00	125.038.413,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	24.550.000,00	0,00	24.550.000,00	(18.500,00)	99,92
		0,00	24.531.500,00	0,00	24.531.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 48	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Unit Layanan Pendidikan 4 Kecamatan se Kota Sawahlunto	0,00	49.522.900,00	8.000.000,00	57.522.900,00	(4.551.699,00)	92,09
		0,00	44.985.201,00	7.986.000,00	52.971.201,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	***Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur***	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(201.606,00)	99,60
		0,00	49.798.394,00	0,00	49.798.394,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(201.606,00)	99,60
		0,00	49.798.394,00	0,00	49.798.394,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 11	Pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	***Program Pendidikan Anak Usia Dini***	0,00	83.400.000,00	1.000.000,00	84.400.000,00	(9.754.203,00)	88,44
		0,00	73.655.797,00	990.000,00	74.645.797,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67	Gebyar dan Lomba Hari Anak Nasional (HAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68	Belanja DAK BOP PAUD	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	(5.135.450,00)	89,93
		0,00	45.864.550,00	0,00	45.864.550,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 69	Pelaksanaan Pokja Forum PAUD dan HIMPAUDI	0,00	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	0,00	100,00
		0,00	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 71	Porseni guru dan murid TK	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	100,00
		0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 74	Pembenahan PAUD Kasih Ibu Mekar Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75	Pembuatan Gedung TK di Dusun Balai Tangah Desa Pasar Kubang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 90	Lanjutan Pembangunan PAUD Dusun Luak Mani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 91	BOPDA TK Negeri	0,00	14.300.000,00	1.000.000,00	15.300.000,00	(4.618.753,00)	69,81
		0,00	9.691.247,00	990.000,00	10.681.247,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	***Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun***	0,00	1.617.109.720,00	0,00	1.617.109.720,00	(185.000.213,00)	88,56
		0,00	1.432.109.507,00	0,00	1.432.109.507,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79	BOSDA SD Negeri se Kota Sawahlunto	0,00	909.977.120,00	0,00	909.977.120,00	(100.770.978,00)	88,93
		0,00	809.206.142,00	0,00	809.206.142,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 80	BOSDA SMP Negeri se Kota Sawahlunto	0,00	703.503.000,00	0,00	703.503.000,00	(83.959.635,00)	88,07
		0,00	619.543.365,00	0,00	619.543.365,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pelaksanaan Sekolah (BOS)	0,00	3.629.600,00	0,00	3.629.600,00	(269.600,00)	92,57
		0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	***Program Pendidikan Non Formal***	11.400.000,00	339.134.000,00	259.271.000,00	609.805.000,00	(72.045.591,00)	88,19
		0,00	278.906.464,00	258.852.945,00	537.759.409,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14	Pelaksanaan Kelompok Bermain Binaan SPNF SKB	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	(2.617.800,00)	93,46
		0,00	37.382.200,00	0,00	37.382.200,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 18	Pelaksanaan Pengelolaan SPNF SKB	0,00	75.834.000,00	0,00	75.834.000,00	(20.021.736,00)	73,60
		0,00	55.812.264,00	0,00	55.812.264,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 19	Pelaksanaan PBM Paket A, B dan C (DAK Nor Fisik Kesetaraan)	0,00	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	(23.588.000,00)	88,52
		0,00	181.912.000,00	0,00	181.912.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 22	Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 32	Pelatihan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan (PKH/PKW) bagi Anak Putus Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 33	Pelaksanaan USBN Paket A dan UNBK Paket I dan C	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 36	Belanja DAK PAUD	11.400.000,00	2.000.000,00	259.271.000,00	272.671.000,00	(11.818.055,00)	95,67
		0,00	2.000.000,00	258.852.945,00	260.852.945,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	***Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan***	49.550.000,00	31.600.000,00	0,00	81.150.000,00	(13.700.000,00)	83,12
		35.850.000,00	31.600.000,00	0,00	67.450.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 13	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19	Pelaksanaan TPK TK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20	Pelaksanaan UKG dan PKG Bagi Guru TK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 28	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit	0,00	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	0,00	100,00
		0,00	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 33	Pemberian Reward Pembimbing dan Siswa Pemenang Lomba Akademik dan Non Akademik Tingkat Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 39	Olimpiade guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 44	Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru SLTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 46	Operasuonal Forum Ilmiah Guru (FIG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 53	Bimtek dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM (Saince Technology Engineering and Mathematic)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 55	Pelaksanaan USBN SD dan SMP	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	(950.000,00)	88,69
		7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 56	Ujian Semester Standar Kota SD dan SMP	41.150.000,00	0,00	0,00	41.150.000,00	(12.750.000,00)	69,02
		28.400.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	***Program Manajemen Pelayanan Pendidikan***	0,00	5.838.459.202,00	1.399.052.798,00	7.237.512.000,00	291.758.627,00	104,03
		0,00	5.951.679.302,00	1.577.591.325,00	7.529.270.627,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 12	Pemutakhiran Direktori Guru, Penyusunan Profil dan Buku Saku Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 14	Pemeriksaan Ujian Standar Kota SD/MI/ SMP/MTs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 16	Pelaksanaan Pelatihan Operator Dapodik SD dan SMP	0,00	5.062.000,00	0,00	5.062.000,00	0,00	100,00
		0,00	5.062.000,00	0,00	5.062.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 17	Pelaksanaan KKG TK / Gugus PAUD Non Formal	0,00	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00	(3.150.000,00)	76,92
		0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 20	Pelatihan Dapodik PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 21	Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan Dikmas	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	100,00
		0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 22	Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41	Pengadaan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Online	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42	Penunjang Sarana Prasarana Pendidikan Boarding School SMPN 2 Sawahlunto	0,00	18.085.000,00	61.415.000,00	79.500.000,00	(6.850,00)	99,99
		0,00	18.084.000,00	61.409.150,00	79.493.150,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 51	Bantuan Pelaksanaan Sekolah SD Negeri	0,00	3.840.944.188,00	928.127.803,00	4.769.071.991,00	392.260.256,00	108,23
		0,00	4.063.988.504,00	1.097.343.743,00	5.161.332.247,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 52	Bantuan Pelaksanaan Sekolah SMP Negeri	0,00	1.952.418.014,00	409.509.995,00	2.361.928.009,00	(97.344.779,00)	95,88
		0,00	1.845.744.798,00	418.838.432,00	2.264.583.230,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24	***Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP)***	3.720.000,00	1.008.623.400,00	9.578.012.600,00	10.590.356.000,00	(692.207.968,00)	93,46
		1.950.000,00	987.321.631,00	8.908.876.401,00	9.898.148.032,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01	Belanja DAK Fisik tingkat SD dan Pendamping	3.150.000,00	703.527.400,00	7.613.011.600,00	8.319.689.000,00	(530.411.216,00)	93,62
		1.950.000,00	690.755.736,00	7.096.572.048,00	7.789.277.784,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02	Belanja DAK Fisik tingkat SMP dan Pendamping	0,00	106.996.000,00	1.965.001.000,00	2.071.997.000,00	(161.213.597,00)	92,22
		0,00	98.479.050,00	1.812.304.353,00	1.910.783.403,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 60	Bantuan Sarana Belajar untuk Siswa Baru	570.000,00	198.100.000,00	0,00	198.670.000,00	(583.155,00)	99,71
		0,00	198.086.845,00	0,00	198.086.845,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 70	Pembuatan Asrama Putri Tiga Tingkat Boarding Kelas SMP 2 Sapan Kota Sawahlunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 72	Pembangunan RKB SDN 01 Silungkang Tigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25	***Program Peningkatan Kompetensi dan Kreatifitas Siswa***	5.800.000,00	2.232.918.700,00	0,00	2.238.718.700,00	(89.500.000,00)	96,00
		5.800.000,00	2.143.418.700,00	0,00	2.149.218.700,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 01	Pelatihan Center MIPA Tingkat SD	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	100,00
		5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 03	Pelaksanaan olimpiade dan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) siswa SD/SMP.	400.000,00	10.200.000,00	0,00	10.600.000,00	0,00	100,00
		400.000,00	10.200.000,00	0,00	10.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 05	Lomba Kreatifitas Seni Siswa (FLS2N) SD/SMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 08	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP	0,00	142.718.700,00	0,00	142.718.700,00	(10.000.000,00)	92,99
		0,00	132.718.700,00	0,00	132.718.700,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.01 . 1.01.01 . 01 . 25 . 14	Peningkatan Kompetensi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi	0,00	2.080.000.000,00	0,00	2.080.000.000,00	(79.500.000,00)	96,18
		0,00	2.000.500.000,00	0,00	2.000.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	***Program Pendidikan Berkarakter***	0,00	49.700.000,00	0,00	49.700.000,00	(38.058.560,00)	23,42
		0,00	11.641.440,00	0,00	11.641.440,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 03	Pelaksanaan pendidikan berkarakter untuk guru SD/SMP	0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00	(28.200.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 04	Pelatihan Guru Tahfidz Al-Quran SD/SMP	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	(9.858.560,00)	54,15
		0,00	11.641.440,00	0,00	11.641.440,00		
1.02	**Kesehatan**	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
1.02 . 1.01.01	**Dinas Pendidikan**	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
1.02 . 1.01.01 . 01	**Dinas Pendidikan**	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
1.02 . 1.01.01 . 01 . 19	***Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat***	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
1.02 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05	Pelaksanaan Penilaian UKS Dan Lomba Sekolah Sehat	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
	JUMLAH	7.234.995.000,00	12.477.503.277,00	11.255.336.398,00	30.967.834.675,00	(960.115.039,00)	96,90
		7.207.484.400,00	12.036.038.565,00	10.764.196.671,00	30.007.719.636,00		

Sawahlunto,
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban
Nomor : -
Tanggal :

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	JENIS BELANJA			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	(Rp)	(%)
1	2		3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		9.590.059.667,00	20.675.934.816,00	22.218.802.353,00	52.484.796.836,00	(5.335.957.022,18)	89,83
			8.482.693.101,00	18.684.273.009,00	19.981.873.703,82	47.148.839.813,82		
1.02	**Kesehatan**		9.590.059.667,00	20.675.934.816,00	22.218.802.353,00	52.484.796.836,00	(5.335.957.022,18)	89,83
			8.482.693.101,00	18.684.273.009,00	19.981.873.703,82	47.148.839.813,82		
1.02 . 1.02.01	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		9.590.059.667,00	20.675.934.816,00	22.218.802.353,00	52.484.796.836,00	(5.335.957.022,18)	89,83
			8.482.693.101,00	18.684.273.009,00	19.981.873.703,82	47.148.839.813,82		
1.02 . 1.02.01 . 01	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d**		9.590.059.667,00	20.675.934.816,00	22.218.802.353,00	52.484.796.836,00	(5.335.957.022,18)	89,83
			8.482.693.101,00	18.684.273.009,00	19.981.873.703,82	47.148.839.813,82		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***		3.187.515.000,00	372.654.500,00	8.400.000,00	3.568.569.500,00	(320.387.554,00)	91,02
			2.892.693.400,00	347.128.546,00	8.360.000,00	3.248.181.946,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat		0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	(195.000,00)	87,38
			0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		0,00	163.800.000,00	0,00	163.800.000,00	(21.175.477,00)	87,07
			0,00	142.624.523,00	0,00	142.624.523,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		0,00	23.239.000,00	0,00	23.239.000,00	(1.015.050,00)	95,63
			0,00	22.223.950,00	0,00	22.223.950,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		0,00	28.493.000,00	0,00	28.493.000,00	(6.300,00)	99,98
			0,00	28.486.700,00	0,00	28.486.700,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaa		0,00	18.434.000,00	0,00	18.434.000,00	(33.120,00)	99,82
			0,00	18.400.880,00	0,00	18.400.880,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	9.527.500,00	0,00	9.527.500,00	(53.200,00)	99,44
		0,00	9.474.300,00	0,00	9.474.300,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	100,00
		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	22.847.500,00	0,00	22.847.500,00	(1.522.525,00)	93,34
		0,00	21.324.975,00	0,00	21.324.975,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	92.968.500,00	0,00	92.968.500,00	(232.382,00)	99,75
		0,00	92.736.118,00	0,00	92.736.118,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PN	2.893.945.000,00	0,00	0,00	2.893.945.000,00	(267.791.600,00)	90,75
		2.626.153.400,00	0,00	0,00	2.626.153.400,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	293.570.000,00	4.250.000,00	8.400.000,00	306.220.000,00	(27.082.900,00)	91,16
		266.540.000,00	4.237.100,00	8.360.000,00	279.137.100,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	(80.000,00)	98,45
		0,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	***Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur***	0,00	847.802.500,00	47.500.000,00	895.302.500,00	(15.844.799,00)	98,23
		0,00	832.339.201,00	47.118.500,00	879.457.701,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	(361.500,00)	99,10
		0,00	0,00	39.638.500,00	39.638.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	(20.000,00)	99,73
		0,00	0,00	7.480.000,00	7.480.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	821.802.500,00	0,00	821.802.500,00	(15.325.799,00)	98,14
		0,00	806.476.701,00	0,00	806.476.701,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	(97.500,00)	99,39
		0,00	15.902.500,00	0,00	15.902.500,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(40.000,00)	99,60
		0,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03	***Program peningkatan disiplin aparatur***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	***Program Obat dan Perbekalan Kesehatan***	22.400.000,00	126.233.000,00	0,00	148.633.000,00	(19.974.059,00)	86,56
		16.700.000,00	111.958.941,00	0,00	128.658.941,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(80.659,00)	99,92
		0,00	99.919.341,00	0,00	99.919.341,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07	Distribusi obat dan e-logistik (DAK NON FISIK BOK)	22.400.000,00	26.233.000,00	0,00	48.633.000,00	(19.893.400,00)	59,09
		16.700.000,00	12.039.600,00	0,00	28.739.600,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	***Program Upaya Kesehatan Masyarakat***	3.191.872.750,00	3.876.468.000,00	36.000.000,00	7.104.340.750,00	(540.400.284,00)	92,39
		3.165.991.355,00	3.362.311.111,00	35.638.000,00	6.563.940.466,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 02	Monitoring Garam Beryodium Tingkat Pasar dan Desa/Kelurahan	0,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	(616.900,00)	91,36
		0,00	6.523.100,00	0,00	6.523.100,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 08	Penyelengaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (UNIT)	0,00	15.000.000,00	36.000.000,00	51.000.000,00	(4.145.660,00)	91,87
		0,00	11.216.340,00	35.638.000,00	46.854.340,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11	Penyelenggaraan Bantuan Pelaksanaan Kesehatan/BOK (DAK NON FISIK)	3.191.872.750,00	3.836.828.000,00	0,00	7.028.700.750,00	(529.780.374,00)	92,46
		3.165.991.355,00	3.332.929.021,00	0,00	6.498.920.376,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13	Pelayanan Kesehatan Hari Libur Lebaran	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	(4.557.700,00)	70,60
		0,00	10.942.300,00	0,00	10.942.300,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14	Pelayan Kesehatan Event Nasional	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	(1.299.650,00)	35,02
		0,00	700.350,00	0,00	700.350,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22	Pelatihan Dokter Kecil dan KKR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	***Program Pengawasan Obat dan Makanan***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 08	Pengawasan Keamanan pangan jajan anak sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	***Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat***	0,00	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00	(2.070.800,00)	94,02
		0,00	32.529.200,00	0,00	32.529.200,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07	Pelaksanaan Perkemahan Saka Bakti Husada Tingkat Provinsi Sumbar dan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 13	Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	(6.000,00)	99,87
		0,00	4.494.000,00	0,00	4.494.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 19	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 21	Pelaksanaan Indikator Posyandu Pada KKG PKK KB Kesehatan Tahun 2020	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	(1.964.800,00)	81,97
		0,00	8.935.200,00	0,00	8.935.200,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 22	Penjaringan Kesehatan (skrining) bagi Murid Baru SD-SLTA	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	(100.000,00)	99,48
		0,00	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	***Program Perbaikan Gizi Masyarakat***	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	(105.000,00)	99,45
		0,00	19.145.000,00	0,00	19.145.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 09	Pelaksanaan Hari Gizi Nasional (HGN)	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	(105.000,00)	99,45
		0,00	19.145.000,00	0,00	19.145.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	***Program Pengembangan Lingkungan Sehat***	0,00	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	(10.606.590,00)	70,37
		0,00	25.193.410,00	0,00	25.193.410,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 09	Pelaksanaan Forum Kota Sehat	0,00	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	(10.606.590,00)	70,37
		0,00	25.193.410,00	0,00	25.193.410,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	***Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular***	2.000.000,00	174.000.000,00	13.000.000,00	189.000.000,00	(63.223.790,00)	66,55
		0,00	112.906.210,00	12.870.000,00	125.776.210,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 01	Pengendalian TB	0,00	65.000.000,00	6.000.000,00	71.000.000,00	(16.512.000,00)	76,74
		0,00	48.548.000,00	5.940.000,00	54.488.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 02	Pengendalian Penyakit Kusta	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	(608.000,00)	94,47
		0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 03	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan Vektor	0,00	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	(2.525.000,00)	54,30
		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 04	Pelaksanaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA)	0,00	23.425.000,00	0,00	23.425.000,00	(22.325.000,00)	4,70
		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05	Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	2.000.000,00	4.800.000,00	0,00	6.800.000,00	(2.830.000,00)	58,38
		0,00	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	0,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	(17.871.300,00)	61,98
		0,00	29.128.700,00	0,00	29.128.700,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 12	Pengendalian Faktor resiko dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS	0,00	17.250.000,00	7.000.000,00	24.250.000,00	(552.490,00)	97,72
		0,00	16.767.510,00	6.930.000,00	23.697.510,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23	***Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan***	152.300.000,00	284.975.000,00	0,00	437.275.000,00	(181.090.520,00)	58,59
		70.200.000,00	185.984.480,00	0,00	256.184.480,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 09	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (DAK Akreditasi)	152.300.000,00	284.975.000,00	0,00	437.275.000,00	(181.090.520,00)	58,59
		70.200.000,00	185.984.480,00	0,00	256.184.480,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 13	Pelatihan Penanggulangan Kegawat daruratan bagi tenaga kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 16	Pendataan Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25	***Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya***	17.500.000,00	1.651.537.415,00	20.963.888.446,00	22.632.925.861,00	(2.226.311.318,18)	90,16
		2.980.000,00	1.475.862.606,00	18.927.771.936,82	20.406.614.542,82		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24	Pengadaan alat kedokteran/Kesehatan	0,00	0,00	199.600.000,00	199.600.000,00	(2.978.103,00)	98,51
		0,00	0,00	196.621.897,00	196.621.897,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kedokteran/Kesehatan	0,00	69.250.000,00	0,00	69.250.000,00	(41.940.400,00)	39,44
		0,00	27.309.600,00	0,00	27.309.600,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 26	Pengadaan sarana Dan Prasarana Penunjang Keluarga Berencana (DAK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB)	2.500.000,00	9.263.000,00	891.350.000,00	903.113.000,00	(49.526.270,00)	94,52
		0,00	8.927.000,00	844.659.730,00	853.586.730,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 28	DAK Murni Pendamping dan Pelaksanaan	15.000.000,00	1.573.024.415,00	19.872.938.446,00	21.460.962.861,00	(2.131.866.545,18)	90,07
		2.980.000,00	1.439.626.006,00	17.886.490.309,82	19.329.096.315,82		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 29	Rehab Pondok Bersalin Desa (Polindes) Batu Tanjung Kec Talawi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28	***Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan***	3.014.471.917,00	12.257.347.308,00	1.124.426.500,00	16.396.245.725,00	(1.657.890.214,00)	89,89
		2.332.128.346,00	11.481.609.305,00	924.617.860,00	14.738.355.511,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 06	kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	(4.700.000,00)	86,57
		0,00	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 10	Pelayanan Kesehatan Peserta jaminan Kesehatan Sumbar Sakato	0,00	4.219.406.000,00	15.000.000,00	4.234.406.000,00	(83.141.850,00)	98,04
		0,00	4.136.304.150,00	14.960.000,00	4.151.264.150,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 11	Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Sawahlunto	0,00	6.947.174.000,00	0,00	6.947.174.000,00	(347.557.000,00)	95,00
		0,00	6.599.617.000,00	0,00	6.599.617.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 12	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasiona FKTP Puskesmas Talawi	1.231.167.392,00	294.900.000,00	198.350.000,00	1.724.417.392,00	(648.423.153,00)	62,40
		737.687.392,00	176.294.722,00	162.012.125,00	1.075.994.239,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 13	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasiona FKTP Puskesmas Silungkang	515.000.000,00	150.277.232,00	204.200.000,00	869.477.232,00	(92.210.768,00)	89,39
		465.965.479,00	130.107.060,00	181.193.925,00	777.266.464,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 14	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasiona FKTP Puskesmas Kolok	244.103.890,00	96.091.446,00	178.866.500,00	519.061.836,00	(50.134.606,00)	90,34
		224.613.210,00	78.965.720,00	165.348.300,00	468.927.230,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 15	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasiona FKTP Puskesmas Sungai Durian	470.000.000,00	166.722.101,00	269.800.000,00	906.522.101,00	(232.811.931,00)	74,32
		417.092.870,00	75.921.800,00	180.695.500,00	673.710.170,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 16	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasiona FKTP PuskesmasKampung Teleng	317.130.635,00	259.369.400,00	135.810.000,00	712.310.035,00	(157.029.482,00)	77,95
		270.013.300,00	171.051.453,00	114.215.800,00	555.280.553,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 17	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasiona FKTP Puskesmas Lunto	237.070.000,00	88.407.129,00	122.400.000,00	447.877.129,00	(41.881.424,00)	90,65
		216.756.095,00	83.047.400,00	106.192.210,00	405.995.705,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29	***Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita***	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	(27.000.000,00)	25,00
		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 09	Rehabilitasi Medik Berbasis Masyarakat untuk Anak CP dan ABK	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	(27.000.000,00)	25,00
		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30	***Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 08	Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31	***Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan***	2.000.000,00	9.800.000,00	0,00	11.800.000,00	(3.062.300,00)	74,05
		2.000.000,00	6.737.700,00	0,00	8.737.700,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumal tangga	2.000.000,00	9.800.000,00	0,00	11.800.000,00	(3.062.300,00)	74,05
		2.000.000,00	6.737.700,00	0,00	8.737.700,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32	***Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak***	0,00	228.922.000,00	0,00	228.922.000,00	(176.013.386,00)	23,11
		0,00	52.908.614,00	0,00	52.908.614,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 04	Penatalaksanaan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Ibu dan Anak	0,00	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	(1.475.000,00)	69,84
		0,00	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 06	Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	0,00	44.250.000,00	0,00	44.250.000,00	(6.804.000,00)	84,62
		0,00	37.446.000,00	0,00	37.446.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 10	Bantuan Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK NON FISIK)	0,00	179.782.000,00	0,00	179.782.000,00	(167.734.386,00)	6,70
		0,00	12.047.614,00	0,00	12.047.614,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 39	***Pelaksanaan kegiatan operasional rutin Sarana Pelayanan Kesehatan***	0,00	694.162.593,00	16.587.407,00	710.750.000,00	(85.645.158,00)	87,95
		0,00	608.517.435,00	16.587.407,00	625.104.842,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 01	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Talawi	0,00	131.950.000,00	0,00	131.950.000,00	(13.374.700,00)	89,86
		0,00	118.575.300,00	0,00	118.575.300,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 02	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Kolok	0,00	78.800.000,00	0,00	78.800.000,00	(5.969.010,00)	92,43
		0,00	72.830.990,00	0,00	72.830.990,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 03	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Sei Durian	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	(2.923.622,00)	96,43
		0,00	79.076.378,00	0,00	79.076.378,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 04	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Kp. Teleng	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	(6.874.147,00)	92,76
		0,00	88.125.853,00	0,00	88.125.853,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 05	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Lunto	0,00	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	(16.310.300,00)	81,25
		0,00	70.689.700,00	0,00	70.689.700,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 06	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Silungkang	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(36.727.386,00)	75,52
		0,00	113.272.614,00	0,00	113.272.614,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 07	Biaya Pelaksanaan Rutin Instalasi Farmasi Kota	0,00	69.412.593,00	16.587.407,00	86.000.000,00	(3.465.993,00)	95,97
		0,00	65.946.600,00	16.587.407,00	82.534.007,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 41	***Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)***	0,00	26.382.500,00	9.000.000,00	35.382.500,00	(6.331.250,00)	82,11
		0,00	20.141.250,00	8.910.000,00	29.051.250,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 41 . 01	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	0,00	16.710.000,00	9.000.000,00	25.710.000,00	(3.687.750,00)	85,66
		0,00	13.112.250,00	8.910.000,00	22.022.250,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	JENIS BELANJA			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	(Rp)	(%)
1	2		3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
1.02 . 1.02.01 . 01 . 41 . 02	Deteksi Dini dan Penanggulangan Kesehatan Jiwa dan Napza		0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	(141.000,00)	96,62
			0,00	4.029.000,00	0,00	4.029.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 41 . 03	Deteksi dini dan penanggulangan kesehatan indra (penglihatan dan pendengaran)		0,00	5.502.500,00	0,00	5.502.500,00	(2.502.500,00)	54,52
			0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 42	***Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Kesehatan***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 42 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 42 . 02	Pertemuan Tim penilai kredit point dan tenaga fungsional tertentu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**		84.600.000,00	1.200.663.000,00	0,00	1.285.263.000,00	(123.016.150,00)	90,43
			75.600.000,00	1.086.646.850,00	0,00	1.162.246.850,00		
2.05	**Lingkungan Hidup**		0,00	118.756.000,00	0,00	118.756.000,00	(3.810.500,00)	96,79
			0,00	114.945.500,00	0,00	114.945.500,00		
2.05 . 1.02.01	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		0,00	118.756.000,00	0,00	118.756.000,00	(3.810.500,00)	96,79
			0,00	114.945.500,00	0,00	114.945.500,00		
2.05 . 1.02.01 . 01	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d**		0,00	118.756.000,00	0,00	118.756.000,00	(3.810.500,00)	96,79
			0,00	114.945.500,00	0,00	114.945.500,00		
2.05 . 1.02.01 . 01 . 27	***Program Peningkatan Kualitas Air***		0,00	118.756.000,00	0,00	118.756.000,00	(3.810.500,00)	96,79
			0,00	114.945.500,00	0,00	114.945.500,00		
2.05 . 1.02.01 . 01 . 27 . 01	Pembinaan Pengusaha Depot Air Minum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
2.05 . 1.02.01 . 01 . 27 . 03	Pemeriksaan Kualitas Air Minum		0,00	14.256.000,00	0,00	14.256.000,00	(841.500,00)	94,10
			0,00	13.414.500,00	0,00	13.414.500,00		
2.05 . 1.02.01 . 01 . 27 . 04	Pengelolaan Limbah Medis		0,00	104.500.000,00	0,00	104.500.000,00	(2.969.000,00)	97,16
			0,00	101.531.000,00	0,00	101.531.000,00		
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		84.600.000,00	1.081.907.000,00	0,00	1.166.507.000,00	(119.205.650,00)	89,78
			75.600.000,00	971.701.350,00	0,00	1.047.301.350,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
2.08 . 1.02.01	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	84.600.000,00	1.081.907.000,00	0,00	1.166.507.000,00	(119.205.650,00)	89,78
		75.600.000,00	971.701.350,00	0,00	1.047.301.350,00		
2.08 . 1.02.01 . 01	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d**	84.600.000,00	1.081.907.000,00	0,00	1.166.507.000,00	(119.205.650,00)	89,78
		75.600.000,00	971.701.350,00	0,00	1.047.301.350,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 16	***Program Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja***	2.400.000,00	24.907.000,00	0,00	27.307.000,00	(2.575.000,00)	90,57
		2.400.000,00	22.332.000,00	0,00	24.732.000,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01	Pembinaan danTemu Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	(797.500,00)	93,24
		0,00	11.002.500,00	0,00	11.002.500,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03	Pembinaan dan Jambore Saka Kencana	2.400.000,00	13.107.000,00	0,00	15.507.000,00	(1.777.500,00)	88,54
		2.400.000,00	11.329.500,00	0,00	13.729.500,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 17	***Program pelayanan kontrasepsi***	82.200.000,00	1.057.000.000,00	0,00	1.139.200.000,00	(116.630.650,00)	89,76
		73.200.000,00	949.369.350,00	0,00	1.022.569.350,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01	Pelayanan konseling KB	0,00	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	(9.607.650,00)	45,72
		0,00	8.092.350,00	0,00	8.092.350,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 17 . 05	Jambore/temu kreatifitas program KKBPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 17 . 06	Pelaksanaan Balai Penyuluhan KB dan Alat Kontrasepsi	82.200.000,00	1.039.300.000,00	0,00	1.121.500.000,00	(107.023.000,00)	90,46
		73.200.000,00	941.277.000,00	0,00	1.014.477.000,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 18	***Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 18 . 02	Pelaksanaan Forum Kader KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 18 . 03	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 24	***Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 1.02.01 . 01 . 24 . 02	Pelaksanaan Integrasi BKB dengan Posyandu dan PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
	JUMLAH	9.674.659.667,00	21.876.597.816,00	22.218.802.353,00	53.770.059.836,00	(5.458.973.172,18)	89,85
		8.558.293.101,00	19.770.919.859,00	19.981.873.703,82	48.311.086.663,82		

Sawahlunto,
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Printed By SimDa

Lampiran I.4 Perda Pertanggungjawaban
Nomor : -
Tanggal :

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN

KODE			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
01			**PELAYANAN UMUM**	226.673.924.410,80	201.804.274.608,32	(24.869.649.802,48)	89,03
01	2	03	Pangan	10.986.396.752,00	10.837.465.072,00	(148.931.680,00)	98,64
01	2	10	Komunikasi dan Informatika	3.461.897.000,00	3.212.123.061,00	(249.773.939,00)	92,79
01	2	14	Statistik	128.575.150,00	99.667.434,00	(28.907.716,00)	77,52
01	2	15	Persandian	32.000.000,00	14.102.000,00	(17.898.000,00)	44,07
01	2	18	Kearsipan	103.113.800,00	100.485.130,00	(2.628.670,00)	97,45
01	4	01	Administrasi Pemerintahan	72.591.735.070,80	66.252.865.996,60	(6.338.869.074,20)	91,27
01	4	02	Pengawasan	13.602.399.514,00	9.549.676.836,00	(4.052.722.678,00)	70,21
01	4	03	Perencanaan	5.157.296.882,00	4.803.178.314,00	(354.118.568,00)	93,13
01	4	04	Keuangan	113.092.125.131,00	100.208.650.662,72	(12.883.474.468,28)	88,61
01	4	05	Kepegawaian	7.458.340.111,00	6.682.418.052,00	(775.922.059,00)	89,60
01	4	06	Pendidikan dan Pelatihan	29.785.000,00	25.000.000,00	(4.785.000,00)	83,93
01	4	07	Penelitian dan Pengembangan	30.260.000,00	18.642.050,00	(11.617.950,00)	61,61
03			**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	25.696.748.808,18	13.938.717.603,00	(11.758.031.205,18)	54,24
03	1	05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	25.696.748.808,18	13.938.717.603,00	(11.758.031.205,18)	54,24
04			**EKONOMI**	20.027.817.508,30	22.166.153.356,00	2.138.335.847,70	110,68
04	2	01	Tenaga Kerja	853.583.500,00	795.102.390,00	(58.481.110,00)	93,15
04	2	07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	596.527.000,00	435.473.498,00	(161.053.502,00)	73,00
04	2	09	Perhubungan	4.970.869.301,25	8.566.665.941,00	3.595.796.639,75	172,34
04	2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.637.673.743,05	5.091.632.425,00	(546.041.318,05)	90,31
04	2	12	Penanaman Modal	4.478.565.652,00	4.131.438.331,00	(347.127.321,00)	92,25
04	3	01	Kelautan dan Perikanan	88.225.000,00	84.330.850,00	(3.894.150,00)	95,59
04	3	03	Pertanian	1.886.302.034,00	1.624.042.939,00	(262.259.095,00)	86,10
04	3	06	Perdagangan	869.531.278,00	828.123.689,00	(41.407.589,00)	95,24
04	3	07	Perindustrian	646.540.000,00	609.343.293,00	(37.196.707,00)	94,25
05			**LINGKUNGAN HIDUP**	3.096.214.585,00	2.601.166.684,70	(495.047.900,30)	84,01
05	2	04	Pertanahan	164.882.400,00	145.489.763,00	(19.392.637,00)	88,24

Printed By SimDa

KODE			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
05	2	05	Lingkungan Hidup	2.931.332.185,00	2.455.676.921,70	(475.655.263,30)	83,77
06			**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	38.728.821.660,20	35.215.847.057,95	(3.512.974.602,25)	90,93
06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.690.490.251,30	20.782.922.297,09	(1.907.567.954,21)	91,59
06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.038.331.408,90	14.432.924.760,86	(1.605.406.648,04)	89,99
07			**KESEHATAN**	146.287.766.589,86	136.163.815.984,82	(10.123.950.605,04)	93,08
07	1	02	Kesehatan	145.121.259.589,86	135.116.514.634,82	(10.004.744.955,04)	93,11
07	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.166.507.000,00	1.047.301.350,00	(119.205.650,00)	89,78
08			**PARIWISATA DAN BUDAYA**	16.447.825.590,50	14.695.498.200,00	(1.752.327.390,50)	89,35
08	2	16	Kebudayaan	6.144.020.379,00	5.813.446.541,00	(330.573.838,00)	94,62
08	3	02	Pariwisata	10.303.805.211,50	8.882.051.659,00	(1.421.753.552,50)	86,20
10			**PENDIDIKAN**	121.388.009.434,81	113.200.032.720,00	(8.187.976.714,81)	93,25
10	1	01	Pendidikan	118.257.517.529,00	110.186.242.814,00	(8.071.274.715,00)	93,17
10	2	13	Kepemudaan dan Olah Raga	273.795.500,00	271.250.000,00	(2.545.500,00)	99,07
10	2	17	Perpustakaan	2.856.696.405,81	2.742.539.906,00	(114.156.499,81)	96,00
11			**PERLINDUNGAN SOSIAL**	9.252.841.870,00	8.723.756.465,00	(529.085.405,00)	94,28
11	1	06	Sosial	5.286.669.238,00	4.988.836.589,00	(297.832.649,00)	94,37
11	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	343.829.450,00	341.529.550,00	(2.299.900,00)	99,33
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Capil	3.622.343.182,00	3.393.390.326,00	(228.952.856,00)	93,68
			JUMLAH	607.599.970.457,65	548.509.262.679,79	(59.090.707.777,86)	90,27

Sawahlunto,
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Printed By SimDa

Data Dukung :

No	Uraian	Realisasi anggaran
1.	Belanja Modal Bidang Kesehatan dengan rincian sebagaimana terlampir	22.218.802.353
2.	Realisasi Belanja Kesehatan : - Kesehatan - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**136.163.815.984.82** 135.166.514.634.82 1.047.301.350

3.2 Sasaran Strategis

Mengelola Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja : Persentase capaian realisasi pendapatan (*fiscal space*)

a. Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan tahun 2019.

Indikator kinerja pendapatan	Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi pendapatan (*fiscal space*)	95,20%	95%	98,19%	103,36	95%	100%

= Realisasi Pendapatan Daerah / Target pendapatan daerah x 100

= 576.968.762.338,56 / 587.598.325.124,00 x 100 %

= 98,19 %

Data Dukung : LRA Pendapatan

b. Perbandingan antara target dan realisasi PBB dan BPHTB tahun 2020.

Indikator kinerja pendapatan	Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi PBB dan BPHTB	2,39%	2.50%	2,83%	96 %	2,5%	96%

Sedangkan untuk PAD adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi (PBB + BPHTB)}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{963.631.143,00 + 718.575.960,00}{59.537.385.897,66} \times 100\ \%$$

= 2,83 %

Data dukung: LRA Pendapatan dimana Pendapatan Pajak PBB dan BPHTB merupakan merupakan rincian objek dari Pajak daerah dan termasuk kedalam kelompok Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 diharapkan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan perekonomian daerah. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Untuk peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah akan melanjutkan upaya-upaya melalui:

a. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan;
b. Pemantapan kelembagaan dan optimalisasi pemungutan pendapatan daerah;
c. Optimalisasi pengelolaan aset dan perusahaan milik daerah;
d. Akurasi data terkait dengan dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

e. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok dalam rangka intensifikasi penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah
f. Adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, dengan Perjanjian Kerjasama ini diharapkan adanya pertukaran informasi/data serta pengawasan bersama terhadap wajib pajak daerah maupun dari pusat.
g. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.
h. Meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan penerimaan daerah yang tersebar pada OPD terkait dalam bentuk rapat-rapat evaluasi dan monitoring PAD dan PBB.
i. Telah dibuat sistem aplikasi e-BPHTB yang terintegrasi dengan data PUSDATIN Kementerian ATR/BPN dan terintegrasi dengan data pembayaran pada Bank Nagari Sawahlunto yang bertujuan agar pendapatan dari BPHTB dapat maksimal dan mencapai target yang ditetapkan.

Dalam menyusun perencanaan dibidang pendapatan daerah, hal mendasar yang perlu diperhatikan dan menjadi kebijakan umum yaitu:

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

c. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan berupa perluasan objek pendapatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan perlu dijamin agar pungutan tersebut tetap memungkinkan terpeliharanya pertumbuhan perekonomian masyarakat dan kepentingan publik lainnya. Secara intensifikasi dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah ada.

1. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan umum dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan;
b. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

Upaya riil yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto adalah melalui:

a. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi dengan memberikan pengertian tentang pentingnya pajak dan retribusi bagi pembangunan daerah.
b. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/ retribusi sehingga mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak.
c. Mengoptimalkan nilai manfaat uang yang ada pada kas daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan serta didepositokan untuk jangka waktu tertentu. Upaya tersebut dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
d. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target.
e. Melakukan pendataan terhadap objek pajak dan retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal.

2. Dana Perimbangan

Kebijakan umum dalam perencanaan dana perimbangan didasarkan pada pagu definitif dana perimbangan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan umum dalam perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat diuraikansebagai berikut:

a. Dana darurat yang diterima dari pemerintah dan bantuan uang dan barang dari badan/lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana alam yang disalurkan melalui pemerintah daerah dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah;
b. Hibah yang diterima baik berupa uang maupun barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah;

c. Penerimaan hibah yang berupa barang mempertimbangkan nilai manfaatnya sehingga dapat memberi manfaat yang optimal dan tidak membebani belanja daerah di kemudian hari;
d. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah;
e. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020 dilihat dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran dapat berjalan dengan relatif baik. Pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ditargetkan sebesar Rp 587.598.325.124,00 dapat direalisasikan Rp.576.968.762.338,56 atau 98,19%
sedangkan Belanja dari alokasi sebesar Rp 607.599.970.457,65 realisasinya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 544.263.658.204,79 atau 89,58%.

Secara umum capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 dapat tercapai namun dalam pelaksanaannya juga ditemui hambatan antara lain terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2020 adalah sebesar 103,48% sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 adalah 95,20%. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian Tahun 2019, maka memang mengalami peningkatan.
Meskipun secara umum capaian Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer telah mendekati target yang ditetapkan, namun jika dilihat lebih jauh ada yang tidak terealisasi 100%.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya aturan baru dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Sedangkan untuk capaian kinerja pendapatan Tahun 2020 dimuat pada tabel berikut:

Tabel

Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan

Sesuai Urutan Terbesar TA 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	+/(-) (Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Pendapatan Hibah	7.281.000.000,00	8.258.960.000,00	977.960.000,00	113,43
2	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.723.206.830,00	39.119.886.393,91	2.396.679.563,91	106,53
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.219.975.167,00	23.175.849.018,00	955.873.851,00	104,30
4	Dana Penyesuaian	11.503.247.000,00	11.503.247.000,00	-	100,00
5	Dana Alokasi Desa	28.631.236.000,00	28.631.236.000,00	-	100,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.027.566.102,00	12.026.462.819,00	(1.103.283,00)	99,99
7	Dana Alokasi Umum	349.197.280.000,00	347.498.276.000,00	(1.699.004.000,00)	99,51
8	Pendapatan Pajak Daerah	5.666.500.000,00	5.602.920.091,75	(63.579.908,25)	98,88
9	Dana Alokasi Khusus	87.652.909.750,00	83.248.105.069,00	(4.404.804.681,00)	94,97
10	Pendapatan retribusi Daerah	3.108.095.850,00	2.788.116.593,00	(319.979.257,00)	89,70
11	Dana Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak	23.587.308.425,00	14.815.556.253,00	(8.771.752.172,00)	62,81
12	Pendapatan Lainnya	-	300.147.100,90	300.147.100,90	-
	Total	587.598.325.124,00	576.968.762.338,56	(10.629.562.785,44)	98,19

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kota Sawahlunto akan terus berupaya melakukan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto, di samping tetap mengusahakan secara optimal pemanfaatan pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pendapatan pajak retribusi pada Tahun Anggaran 2020 tidak mencapai target 100%. Disebabkan pada retribusi izin trayek hanya tercapain target 20% dan untuk retribusi tempat parkir khusus tidak terealisasi.

Sedangkan akibat adanya wabah virus COVID-19 dan penerapan protocol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, untuk penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi hanya tercapai 74% dari target yang ditetapkan.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan OPD, maka jumlah realisasi pendapatan adalah :

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendapatan OPD
Tahun Anggaran 2020

No	SKPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4,153,738,680	3,859,002,725	92.90
2	RSUD/ BLUD	29,000,000,000	30,053,731,965	103.63
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71,650,000	163,683,566.40	228.45
4	Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	363,000,000	390,989,100	107.71
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	72,800,000	80,229,000	110.20
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	50,000,000	105,000,000	210.00
7	Dinas Perhubungan	75,600,000	76,910,580	101.73
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	460,734,000	476,855,000	103.50
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	70,000,000	75,992,600	108.56
10	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Museum	124,500,000	120,895,000	97.10
11	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	633,200,000	430,246,000	67.95
12	Sekretariat Daerah	94,480,000	97,627,500	103.33
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22,347,686,102	23,606,222,861.26	105.63
14	PPKD	530,072,956,342	517,431,376,440.90	97.62
Total		**587,590,345,124.00**	**576,968,762,338.56**	**98.19**

Dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

a. Ekstensifikasi penerimaan

   Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.

b. Menata proses pemungutan

   Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah.

c. Meningkatkan pengawasan

   Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Penyederhaan Mekanisme Penyetoran

   Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.

e. Harmonisasi SKPD yang Berwenang

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh OPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

3.3 Sasaran Strategis

Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku .

Indikator Kinerja :

Persentase OPD dengan laporan BMD yang akurat dan akuntabel

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019.

a. Perbandingan antara target dan realisasi BMD tahun 2019.

Indikator kinerja pendapatan	Tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020	Target akhir renstra 2023	Target capaian terhadap renstra 2023
Persentase capaian realisasi BMD	88%	92%	88, 46%	96,15%	95%	96,15%

= Laporan BMD OPD yang akurat dan akuntabel x 100%
Jumlah OPD

= 23
26

= 88,46 %

Data Pengukuran Kinerja :

OPD yang menyampaikan BMD sebagaimana tabel berikut :

No	Nama OPD	Akurat /Tidak Akurat
1.	Inspektorat	Akurat
2.	Sekretariat DPRD	Akurat
3.	Sekretariat Daerah	Kurang Akurat (penetapan pencatatan status tanah)

No	Nama OPD	Akurat /Tidak Akurat
4.	BKPPSDM	Akurat
5.	Barenlitbangda	Akurat
6.	BPKAD	Akurat
7.	Bakesbangpol-PBD	Akurat
8.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Akurat
9.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	Akurat
10.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan LH	Akurat
11.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Akurat
12.	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Akurat
13.	Dinas Pariwisata Pemuda dan olah raga	Akurat
14.	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak	Akurat
15.	Dinas Perhubungan	
16.	Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuaman	Akurat
17.	Dinas Penanaman Modal dan PTSPNAKER	Akurat
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Akurat
19.	Dinas Pendidikan	Kurang Akurat (data barang yang rusak berat)
20.	Dinas Pekerjaan Umum	Kurang Akurat (Data Jalan)
21.	RSUD	Akurat
22.	Kantor SATPOL-PP dan Damkar	Akurat
23.	Kecamatan Silungkang	Akurat
24.	Kecamatan Barangin	Akurat
25.	Kecamatan Lembah Segar	Akurat
26.	Kecamatan Talawi	Akurat

b. Realisasi Anggaran

Tabel
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1	2	3	4	5=(4/3)*100
A.	**Pendapatan**			
1	Pendapatan Asli Daerah	57.525.368.782,00	59.537.385.897,66	103, 48
2	Dana Perimbangan Transfer Pusat	460.437.498.175,00	445.561.937.322,00	96, 77
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	69.635.458.167,00	71.869.439.118,90	103, 21
	Jumlah Pendapatan TA 2020 (A)	**587.598.325.124,00**	**576.968.762.338,56**	**98, 19**
B.	**Belanja dan Transfer**			
1	Belanja Operasi	432.041.894.181,65	397.517.138.143.22	92,01
2	Belanja Modal	80.646.242.152,00	63.699.147.392,57	78, 99
3	Belanja Tak Terduga	27.540.000.000,00	15.675.538.545,00	56, 92
4	Belanja Transfer	67.371.834.124,00	67.371.834.00	100
	Jumlah Belanja TA 2020(B)	**607.599.970.457,65**	**544.263.658.204,79**	**89,58**
C.	**Surplus/(Defisit) TA 2020 (A-B)**	**(20.001.645.333,65)**	**32.705.104.133,77**	**(163,51)**
D.	**Pembiayaan**			
1	Penerimaan	22.418.312.000,31	13.282.667.228,47	59, 25
2	Pengeluaran	2.416.666.666,66	1.918.666.666,66	79, 39
	Pembiayaan Netto (D)	**20.0001.645.333.65**	**11.364.000.561,81**	**56,82**
E.	**SiLPA (C+D)**	**0,00**	**44.069.104.695.58**	

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawabnya, walaupun tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudakan secara optimal.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas indikator kinerja, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan 4 klasifikasi penilaian yaitu :

- Pencapaian Indikator kinerja sasaran 100% predikatnya **"Sangat baik"**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100 % predikatnya " **Baik** "
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan dibawah 85 % predikatnya " **Sedang** "
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan dibawah 70 % predikatnya **" Kurang Baik "**

Berdasarkan hasil uraian yang dikemukakan diatas pada umumnya pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020, dapat dilaksanakan secara optimal. Sebanyak 41 kegiatan dapat diuraikan pencapaiannya sebagai berikut :

- 0 kegiatan mencapai 100% (Sangat Baik)
- 30 kegiatan mencapai 85% s/d 100% (Baik)
- 8 kegiatan mencapai 70% s/d 85% (Sedang)
- 3 kegiatan mencapai 0% s/d 70% (Kurang Baik)

Untuk mengukur tingkat capaian dari Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 yang telah dibuat, diperlukan adanya suatu indikator.

Indikator adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahaan dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. Indikator Masukan (Input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material teknologi dan lain-lain.
2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator Hasil (outcame) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapakan terwujud.
5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 ini baru bisa dilakukan pada tingkat Indikator Keluaran (output) / Indikator hasil (Outcome).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2020 memberikan informasi mengenai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto yang memuat antara lain pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Hasil analisis pencapaian kinerja tahun 2020 sesuai dengan kesepakatan Penetapan Kinerja menunjukan bahwa secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa kinerja dari 3 sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah terpenuhi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaiaan kinerja (performance result) dengan rencana (performance plan) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis.

Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung presentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

B. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA OPD BPKAD TAHUN 2020

Pada perubahan APBD tahun 2020 target pendapatan yang dikelola oleh OPD BPKAD sebesar Rp.22.347.666.102,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.606.222.861,26 (105,63%), sedangkan untuk membiayai seluruh Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran OPD untuk tahun anggaran 2020 pada BPKAD Kota Sawahlunto dianggarkan sebesar Rp.4.834.761.036,- dengan Realisasi sebesar Rp.4.625.846.649 (95.68%) dan Sisa Anggaran Rp.208.914.387.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk belanja tahun anggaran 2020 pada BPKAD Kota Sawahlunto terdiri dari 5 program dan 41 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini mempunyai 11 kegiatan dengan total anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020 sebanyak Rp. 1.592.718.340,- jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.645.146.944 program ini mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 52.428.604,- (3,19%), sedangkan dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 1.536.385.433 dan tahun 2019 sebesar Rp.1.557.464.720,- adanya penurunan sebesar Rp. 21.079.287,- (1,35%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini mempunyai 6 kegiatan pada tahun 2020 dengan alokasi dana sebesar Rp. 818.830.326,- dibandingkan dengan tahun 2019 prorgam ini mempunyai 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.688.665.000,- atau mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 869.834.674,- (51,51%).

sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 763.824.953,- dan tahun 2019 sebesar Rp. 477.186.737,- adanya peningkatan sebesar Rp. 286.638.216,- (60,07%).

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 91.000.000,- dan tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp.169.230.800,- adanya pengurangan anggaran sebesar Rp. 78.230.800 (46,23%) sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 90.000.000,- dan tahun 2019 sebesar Rp. 167.148.902,- terjadi penurunan sebesar Rp. 77.148.902,- (46,16%)

2. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini di dukung oleh 20 kegiatan mendapat alokasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 837.907.370,- dan tahun 2019 program ini mempunyai 26 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.790.975.900,- terjadi pengurangan sebesar Rp. 953.068.530,- atau (53,22%), sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp.770.039.117,- dan tahun 2019 realisasinya sebesar Rp. 1.420.687.629,- terjadi penurunan sebesar Rp. 650.648.512,- (45,80%). Pada program ini tahun 2020 ada penggabungan beberapa kegiatan sehingga berkurangnya jumlah anggaran secara signifikan di program ini.

3. **Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**

Program ini mempunyai 3 kegiatan dan mendapat alokasi dana pada tahun 2020 sebesar Rp.1.494.305.000 pada tahun 2019 program ini mempunyai 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.861.631.000,- terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 367.326.000,- (19,73%), sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 1.465.597.146,- dan tahun 2019 realisasi sebesar Rp.1.466.305.963,- terjadi penurunan sebesar Rp. 708.817,- (0,05%).

Tabel

Target dan Realisasi Anggaran Pendaatan dan Belanja
Pada OP BPKAD Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	3	4	6
PENDAPATAN DAERAH	**22,347,666,102.00**	**23,606,222,861.26**	**105.63%**
Pendapatan Asli Daerah	**22,347,666,102.00**	**23,606,222,861.26**	**105.63%**
Pendapatan Pajak Daerah	5,666,500,000.00	5,602,920,091.75	98.88%
Penda[atan Retribusi Daerah	567,100,000.00	491,930,413.00	86.74%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,027,566,102.00	12,026,462,819.00	99.99%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4,086,500,000.00	5,484,909,537.51	134.22%
JUMLAH PENDAPATAN	**22,347,666,102.00**	**23,606,222,861.26**	**105.63%**
JUMLAH BELANJA DAERAH	**10,135,191,007.00**	**9,749,361,431.00**	**96.19%**
BEBAN	**10,135,191,007.00**	**9,749,361,431.00**	**96.19%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**5,300,429,971.00**	**5,123,514,782.00**	**96.66%**
Belanja Pegawai	5,300,429,971.00	5,123,514,782.00	96.66%
BELANJA LANGSUNG	**4,834,761,036.00**	**4,625,846,649.00**	**95.68%**
Belanja Pegawai	2,364,275,000.00	2,324,652,935.00	98.32%
Belanja Barang dan Jasa	2,391,886,036.00	2,224,753,514.00	93.01%
Belanja Modal	78,600,000.00	76,440,200.00	97.25%
JUMLAH BELANJA	**10,135,191,007.00**	**9,749,361,431.00**	**96.19%**
Surplus/(Defisit)	**12,212,475,095.00**	**13,856,861,430.26**	

Perbandingan antar target dan realisasi program dan kegiatan tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

TABEL PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2020 DAN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020

No	Kode Rekening	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019		%
			Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
I	4.04.4.04.02	**BELANJA LANGSUNG**	**4,834,761,036.00**	**4,625,846,649.00**	**95.68%**	**7,169,019,644.00**	**5,096,005,686.00**	**71.08%**
1	**4.04.4.04.02.01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1,592,718,340.00**	**1,536,385,433.00**	**96.46%**	**1,645,146,944.00**	**1,557,464,670.00**	**94.67%**
1	4.04.4.04.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5,050,000.00	3,061,000.00	60.61%	4,904,000.00	4,514,500.00	**92.06%**
2	4.04.4.04.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60,850,000.00	50,033,803.00	82.22%	85,619,150.00	48,068,441.00	**56.14%**
3	4.04.4.04.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	56,516,940.00	56,515,690.00	100.00%	18,178,179.00	18,174,860.00	**99.98%**
4	4.04.4.04.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	61,161,750.00	61,160,770.00	100.00%	49,868,000.00	48,162,860.00	**96.58%**
5	4.04.4.04.02.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,161,750.00	61,160,770.00	100.00%	49,868,000.00	48,162,860.00	**96.58%**
6	4.04.4.04.02.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61,161,750.00	61,160,770.00	100.00%	49,868,000.00	48,162,860.00	**96.58%**
7	4.04.4.04.02.01.10	Belanja Alat Tulis Kantor	61,161,750.00	61,160,770.00	100.00%	49,868,000.00	48,162,860.00	96.58%
8	4.04.4.04.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90,594,350.00	90,587,500.00	99.99%	138,995,200.00	137,132,300.00	98.66%
9	4.04.4.04.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18,944,800.00	18,909,000.00	99.81%	8,707,558.00	8,694,900.00	99.85%
10	4.04.4.04.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	54,096,000.00	53,618,000.00	99.12%	67,824,857.00	67,631,500.00	99.71%
11	4.04.4.04.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	268,900,000.00	256,800,735.00	95.50%	424,000,000.00	403,985,309.00	95.28%
12	4.04.4.04.02.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	713,200,000.00	692,182,935.00	97.05%	586,850,000.00	578,150,000.00	98.52%
10	4.04.4.04.02.01.20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	255,000,000.00	246,900,000.00	96.82%	247,200,000.00	231,050,000.00	93.47%
11	4.04.4.04.02.01.21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	8,404,500.00	6,616,000.00	78.72%	13,000,000.00	11,900,000.00	91.54%
2	**4.04.4.04.02.02**	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**818,830,326.00**	**763,824,953.00**	**93.28%**	**1,688,665,000.00**	**477,186,687.00**	**28.26%**
1	4.04.4.04.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas	0.00	0.00	0.00%	1,022,945,000.00	0.00	0.00%
2	4.04.4.04.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	17,000,000.00	16,060,000.00	94.47%	17,400,000.00	14,000,000.00	80.46%
	4.04.4.04.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkal gedung kantor	0.00	0.00	0.00%	25,000,000.00	0.00	0.00%
3	4.04.4.04.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	186,672,201.00	166,568,268.00	89.23%	235,550,000.00	179,787,178.00	76.33%
4	4.04.4.04.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	87,671,900.00	87,668,500.00	100.00%	65,000,000.00	64,984,200.00	99.98%
5	4.04.4.04.02.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	8,213,100.00	6,191,100.00	75.38%	37,575,000.00	963,000.00	2.56%
6	4.04.4.04.02.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/ operasional	59,860,500.00	58,239,900.00	97.29%	74,170,000.00	32,429,500.00	43.72%

No	Kode Rekening	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019		%
			Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
7	4.04.4.04.02.02.53	Pembayaran Kewajiban Sewa Tanah dan Gedung yang digunakan Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto	459,412,625.00	429,097,185.00	93.40%	211,025,000.00	185,022,809.00	87.68%
3	**4.04.4.04.02.05**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**91,000,000.00**	**90,000,000.00**	**98.90%**	**169,230,800.00**	**167,148,902.00**	**98.77%**
1	4.04.4.04.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	91,000,000.00	90,000,000.00	98.90%	169,230,800.00	167,148,902.00	98.77%
4	**4.04.4.04.02.17**	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**837,907,370.00**	**770,039,117.00**	**91.90%**	**1,790,975,900.00**	**1,420,687,629.00**	**79.32%**
1	4.04 .4.04.02.17.02	Penyusunan Pedoman/ Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Penyusunan RKA dan Standar Satuan Harga	7,316,000.00	5,908,000.00	80.75%	11,120,000.00	10,599,080.00	95.32%
2	4.04.4.04.02.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	39,344,000.00	36,001,200.00	91.50%	49,370,500.00	43,070,500.00	87.24%
3	4.04.4.04.02.17.21	Pengelolaan Sistem Informasi dan Keuangan Daerah	77,200,000.00	66,219,700.00	85.78%	129,800,000.00	129,282,378.00	99.60%
4	4.04.4.04.02.17.22	Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB online	7,350,000.00	7,067,500.00	96.16%	32,531,650.00	14,025,500.00	43.11%
5	4.04.4.04.02.17.23	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pendapatan	0.00	0.00	0.00%	89,191,000.00	76,322,033.00	85.57%
6	4.04.4.04.02.17.24	Penyusunan Perubahan APBD	63,410,000.00	52,771,400.00	83.22%	112,744,000.00	109,396,225.00	97.03%
7	4.04.4.04.02.17.25	Penyusunan APBD	89,700,000.00	84,786,171.00	94.52%	121,500,000.00	101,959,021.00	83.92%
8	4.04.4.04.02.17.26	Sosialisasi Peraturan Penganggaran Daerah dan Fasilitasi Penyerahan DPA	3,791,100.00	3,791,100.00	100.00%	45,000,000.00	32,523,160.00	72.27%
9	4.04.4.04.02.17.27	Intensifikasi Pemungutan PBB Serta Pembekalan Kolektor PBB - P2	55,176,000.00	45,710,910.00	82.85%	83,435,350.00	58,197,600.00	69.75%
10	4.04.4.04.02.17.29	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	61,068,600.00	56,539,000.00	92.58%	123,783,000.00	96,652,252.00	78.08%
11	4.04.4.04.02.17.30	Pengelolaan Karcis Pajak dan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00%	40,925,000.00	38,197,400.00	93.34%
12	4.04.4.04.02.17.31	Sosialisasi pajak dan atau retribusi daerah	0.00	0.00	0.00%	15,475,000.00	2,900,000.00	18.74%
13	4.04.4.04.02.17.32	Penyusunan database wajib pajak dan retribusi daerah	1,872,000.00	1,872,000.00	100.00%	3,714,000.00	3,576,600.00	96.30%
14	4.04.4.04.02.17.33	Penyusunan dokumen data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP	18,902,700.00	18,441,700.00	97.56%	71,780,000.00	48,790,400.00	67.97%
15	4.04.4.04.02.17.34	Verifikasi dan pengentrian Data Objek dan Subjek PBB-P2 dan BPHTB	131,065,000.00	128,632,800.00	98.14%	65,795,000.00	45,899,750.00	69.76%
16	4.04.4.04.02.17.35	Sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB	0.00	0.00	0.00%	44,889,900.00	8,985,100.00	20.02%
17	4.04.4.04.02.17.36	Bimtek SAKD dan SPJ OPD	0.00	0.00	0.00%	17,520,000.00	17,498,800.00	99.88%
18	4.04.4.04.02.17.37	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah	103,003,400.00	102,670,920.00	99.68%	204,837,000.00	203,797,259.00	99.49%
19	4.04.4.04.02.17.38	Verifikasi Administrasi Keuangan Daerah	9,835,000.00	9,622,500.00	97.84%	34,250,000.00	33,870,820.00	98.89%
20	4.04.4.04.02.17.40	Pelaksanaan Tuntuttan Perbendaharaan Dan Tuntuttan Ganti Rugi	46,808,000.00	43,690,000.00	93.34%	89,076,000.00	83,960,400.00	94.26%

No	Kode Rekening	Uraian	Tahun 2020		%	Tahun 2019		%
			Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
21	4.04.4.04.02.17.41	Penatausahaan Pengelolaan Administrasi keuangan	45,375,000.00	45,316,500.00	99.87%	50,330,500.00	49,941,100.00	99.23%
22	4.04.4.04.02.17.42	Pengelolaan Dana Transfer dan Manajemen Kas Daerah	18,674,500.00	18,673,500.00	99.99%	110,992,000.00	110,793,108.00	99.82%
23	4.04.4.04.02.17.43	Penyusunan dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Kota Sawahlunto	10,771,570.00	7,579,600.00	70.37%	68,325,000.00	22,118,500.00	32.37%
24	4.04.4.04.02.17.44	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	27,280,000.00	24,756,116.00	90.75%	74,046,000.00	47,973,680.00	64.79%
25	4.04.4.04.02.17.46	Pelelangan Barang Milik Daerah	19,964,500.00	9,988,500.00	50.03%	85,285,000.00	25,909,463.00	30.38%
26	4.04.4.04.02.17.49	Pelatihan administrasi keuangan daerah	0.00	0.00	0.00%	15,260,000.00	4,447,500.00	29.14%
5	**4.04.4.04.02.18**	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota**	**1,494,305,000.00**	**1,465,597,146.00**	**98.08%**	**1,861,631,000.00**	**1,466,305,963.00**	**78.76%**
1	4.04.4.04.02.18.06	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1,449,954,000.00	1,426,392,246.00	98.37%	1,779,600,000.00	1,400,819,761.00	78.72%
2	4.04.4.04.02.18.07	Monitoring dan Evalusasi Barang Milik Daerah	29,356,000.00	24,227,200.00	82.53%	74,603,000.00	58,475,002.00	78.38%
3	4.04.4.04.02.18.08	Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan SAKD	14,995,000.00	14,977,700.00	99.88%	7,428,000.00	7,011,200.00	94.39%
6	**4.04.4.04.02.19**	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**13,370,000.00**	**7,211,835.00**	**53.94%**
1	4.04.4.04.02.19.04	Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00%	13,370,000.00	7,211,835.00	**53.94%**

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto telah memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi serta telah memenuhi 3 (tiga) sasaran yang telah dalam rencana strategis. Fungsi utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto " Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah" telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran utama yang merupakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai integral dari sistem pengelolaan keuangan.

Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan tugas yang dicapai selama ini tidak berarti kinerjanya berjalan secara baik dan lancar, namun masih banyak permasalahan – permasalahan yang memerlukan pemecahan, walaupun masih perlu ditindak lanjuti pada tahun-tahun mendatang.

B. SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan diatas, maka disarankan kepada semua personil Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas di BPKAD Kota Sawahlunto.

2. Kepada semua jajaran di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto untuk dapat melaksanakan semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta lebih meningkatkan koordinasi baik dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sendiri maupun dengan institusi diluar Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

3. Melihat substansi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, sebagai Lembaga Pemerintah yang mengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah perlu dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Sawahlunto, Januari 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

AFRIDARMAN, SE
Pembina
NIP. 19730710 200312 1 004

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRIDARMAN, SE**

Jabatan : Pj.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DERI ASTA, SH**

Jabatan : Walikota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
DERI ASTA, SH	AFRIDARMAN, SE
	NIP 197307102003121004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Persentase Capaian realisasi Belanja (Quality of Budget planning)	90%
		Maksimal defisit APBD	0%
		Persentase capaian realisasi anggaran	85%
		Persentase capaian realisasi belanja modal (quality of spendding) Bidang Pendidikan	20%
		Persentase capaian realisasi belanja modal (quality of spendding) Bidang Kesehatan	10%
2	Mengelola Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiscal Space)	95%
3	Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Persentase OPD dengan laporan BMD yang akurat dan Akuntabel	92%

	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.592.718.340
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	818.830.326
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	91.000.000
4.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	837.907.370
5.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp	1.494.305.000
6.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp	-
	Total	Rp	4.834.761.036

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA, SH

Pj.KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AFRIDARMAN, SE
NIP 19730710 200312 1 004

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DODI FEBRIZAL, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AFRIDARMAN, SE**

Jabatan : Pj.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
AFRIDARMAN, SE	DODI FEBRIZAL, SE, MM
NIP 197307102003121004	NIP 197802012005011007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan)	12 bulan
2		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)	12 bulan
3		Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Bulan)	12 bulan
4		Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan)	12 bulan
5		Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	12 bulan
6		Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan)	12 bulan
7		Makan dan Minum yang disediakan (bulan)	12 bulan
8		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan)	12 bulan
9		Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang)	12 bulan
10		Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan)	12 bulan
11		Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)	12 bulan
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (bulan)	12 bulan
13		Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara (bulan)	12 bulan
14		Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	12 bulan
15	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan aparatur yang terlatih (bulan)	12 bulan

KEGIATAN			ANGGARAN
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.050.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	60.850.000
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp	56.516.940
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	61.161.750
5.	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Rp	90.594.350
6.	Penyediaan Komp. Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Rp	18.944.800
7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	54.096.000
8.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	268.900.000
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	Rp	713.200.000
10.	Penatausahaan Keuangan dan Barang	Rp	255.000.000
11.	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	Rp	8.404.500
12.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp	17.000.000

13.	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Pelaksanaan	Rp		186.672.201
14.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp		87.671.900
15.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Rp		91.000.000
	Total	Rp		1.975.062.441

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Pj.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

AFRIDARMAN, SE
NIP 19730710 200312 1 004

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

DODI FEBRIZAL, SE, MM
NIP 19780201 2005011007

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TARMIATI, S.Sos, MM**

Jabatan : Pj.Kasubbag Adm Keuangan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DODI FEBRIZAL, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
DODI FEBRIZAL, SE, MM	TARMIATI, S.Sos, MM
NIP 197802012005011007	NIP 19820520 2007012005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkatoran	12 bulan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana pelayanan administrasi perkatoran	12 bulan
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	34 orang
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
5	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Penetapan APBD tepat waktu	tepat waktu

	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.592.718.340
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	818.830.326
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	91.000.000
4.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	837.907.370
5.	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp	1.494.305.000
	Total	Rp	4.834.761.036

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DODI FEBRIZAL, SE,MM
NIP 197802012005011007

Kasubbag Adm.Keuangan dan Pelaporan

TARMIATI, S.Sos, MM
NIP 198205202007012005

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RISTINA HIDAYATI, S.Sos**

Jabatan : Kasubbag Adm. Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DODI FEBRIZAL, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
DODI FEBRIZAL, SE, MM	RISTINA HIDAYATI, S.Sos
NIP 197802012005011007	NIP 19760328 2007012004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET
1	2	3	4
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan)	12 bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)	12 bulan
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Bulan)	12 bulan
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan)	12 bulan
5	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (bulan)	12 bulan
6	Penyediaan Komp. Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Bulan)	12 bulan
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum yang disediakan (bulan)	12 bulan
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (bulan)	12 bulan
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (orang)	12 bulan
10	Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penatausahaan Keuangan dan Barang yang dilaksanakan (bulan)	12 bulan
11	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bulan)	12 bulan
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (bulan)	12 bulan
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Pelaksanaan	Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara (bulan)	12 bulan
14	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	12 bulan
15	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya kebutuhan aparatur yang terlatih (bulan)	12 bulan

KEGIATAN			ANGGARAN
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.050.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	60.850.000
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp	56.516.940
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	61.161.750
5.	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Rp	90.594.350
6.	Penyediaan Komp. Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Rp	18.944.800
7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	54.096.000
8.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	268.900.000
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	Rp	713.200.000
10.	Penatausahaan Keuangan dan Barang	Rp	255.000.000
11.	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	Rp	8.404.500
12.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp	17.000.000

13.	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Pelaksanaan	Rp		186.672.201
14.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp		87.671.900
15.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Rp		91.000.000
	Total	**Rp**		**1.975.062.441**

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DODI FEBRIZAL, SE,MM
NIP 19780201 2005011007

Kasubbag Adm Umum dan Kepegawaian

RISTINA HIDAYATI, S.Sos
NIP 19760328 200701 2 004

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIHARTANTI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AFRIDARMAN, SE**

Jabatan : Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
AFRIDARMAN, SE	RIHARTANTI, SE
NIP 197307102003121004	NIP 197307132006042006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyajian LKPD tepat waktu	- Tersedianya laporan keuangan OPD	100%
2	Meningkatnya kualitas penatausahaan Keuangan Daerah	- Persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai aturan	85%
		- Meningkatnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	90%
3	Pengelolaan Kas Daerah sesuai aturan	- Penyampaian laporan penyerapan anggaran tepat waktu	28 laporan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil TPTGR	- Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP Keuangan oleh Pemeriksaan BPK	80%

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan SAKD	Rp	14.995.000
2.	Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban keuangan daerah	Rp	103.003.400
3.	Penatausahaan Pengelolaan Administrasi keuangan	Rp	45.375.000
4.	Pengelolaan Dana Transfer dan Manajemen Kas Daerah	Rp	18.674.500
5.	Verifikasi Administrasi Keuangan Daerah	Rp	9.835.000
7.	Pelaksanaan Tuntutan Perbendahara-an Dan Tuntutan Ganti Rugi	Rp	46.808.000
	Total	Rp	238.690.900

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

AFRI DARMAN, SE
NIP 19730710 200312 1 004

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

RIHARTANTI, SE
NIP 19730713 200604 2 006

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ERIWISNETTY, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Verifikasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIHARTANTI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIHARTANTI, SE	**ERIWISNETTY, S.Sos**
NIP 197307132006042006	**NIP 197205081993032005**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah	- Tersedianya peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah	8 Peraturan
		- Sosialisasi aturan pengelolaan keuangan daerah	1 kali
		- Peningkatan penyelesaian tindak lanjut LHP Pemeriksaan BPK	80%

KEGIATAN		ANGGARAN	
1.	Verifikasi Administrasi Keuangan Daerah	Rp	9.835.000
2.	Pelaksanaan Tuntutan Perbendahara-an Dan Tuntutan Ganti Rugi	Rp	46.808.000
	Total	Rp	71.903.000

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Kasi Verifikasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
RIHARTANTI, SE	ERIWISNETTY, S.Sos
NIP 19730713 200604 2 006	NIP. 19720508 199303 2 005

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HERITA HARUN, SE**

Jabatan : Kepala Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIHARTANTI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIHARTANTI, SE	HERITA HARUN, SE
NIP 197307132006042006	NIP 198202112005012004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan	- Ketepatan waktu penerbitan SP2D	5000 SP2D
		- Pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	87 SPD
		- Terlaksanannya rekonsiliasi kas daerah	12 buah
		- Ketepatan waktu penyampaian laporan dana transfer	28 Jenis
		- Terlaksanannya manajemen dan penatausahaan kas daerah	2, 5 M

	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Penatausahaan Pengelolaan Administrasi keuangan	Rp	45.375.000
2.	Pengelolaan Dana Transfer dan Manajemen Kas Daerah	Rp	18.674.500
	Total	Rp	64.049.500

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

RIHARTANTI, SE
NIP 19730713 200604 2 006

Kasi Perbendaharaan

HERITA HARUN, SE
NIP. 19820211 200501 2 004

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SRI SUWARTININGSIH, SE**

Jabatan : Pj.Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIHARTANTI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIHARTANTI, SE	SRI SUWARTININGSIH, SE
NIP 197307132006042006	NIP 197901072006042014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyusunan laporan keuangan daerah	- Penyusunan laporan keuangan OPD - Penyajian dan pengungkapan dalam pos-pos laporan keuangan - Terlaksanannya rekonsiliasi LRA OPD	

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan SAKD	Rp	14.995.000
2.	Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban keuangan daerah	Rp	103.003.400
	Total	Rp	125.426.400

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

RIHARTANTI, SE
NIP 19730713 200604 2 006

Pj.Kasi Akuntansi & Pelaporan

SRI SUWARTININGSIH, SE
NIP 197901072006042014

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOFI ALDIANA, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AFRIDARMAN, SE**

Jabatan : Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
AFRIDARMAN, SE	YOFI ALDIANA, SE
NIP 197307102003121004	NIP 197711232007012004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menetapkan APBD tepat waktu	Penetapan APBD tidak melewati tahun anggaran berkenaan	31 Desember
2	Menyusun ABPD sesuai aturan	Penyusunan APBD sesuai dengan regulasi	2 Dokumen APBD

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pelaksanaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Rp	1.449.954.000
2.	Penyusunan APBD	Rp	89.700.000
3.	Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Penyusunan RKA dan Standar Satuan Harga	Rp	7.316.000
4.	Penyusunan Perubahan APBD	Rp	63.410.000
5.	Sosialisai Peraturan Kepala Daerah tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp	-
6.	Sosialisasi Peraturan Penganggaran Daerah dan Pelaksanaan Penyerahan DPA	Rp	3.791.100
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Keuangan Daerah	Rp	77.200.000
	Total	**Rp**	**1.691.371.100**

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Pj. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

AFRIDARMAN, SE
NIP 19730710 200312 1 004

Kabid Anggaran

YOFI ALDIANA, SE
NIP 19771123 200701 2 004

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SULISTIKAWATI, S.Akt, M.Si**

Jabatan : Pj.Kepala Seksi Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOFI ALDIANA, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YOFI ALDIANA, SE	SULISTIKAWATI, S.Akt, M.Si
NIP 197711232007012004	NIP 198706222009022003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1	Tersusunnya Anggaran Belanja Langsung pada APBD	- Terlaksananya penyusunan APBD	2 dokumen
		- Verifikasi usulan Belanja Langsung OPD	27 OPD
		- Pedoman penyusunan APBD	2 dokumen

	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Pelaksanaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Rp	1.449.954.000
2.	Penyusunan APBD	Rp	89.700.000
3.	Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Penyusunan RKA dan Standar Satuan Harga	Rp	7.316.000
	Total	**Rp**	**1.546.970.000**

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Kabid Anggaran

YOFI ALDIANA, SE
NIP 19771123 200701 2 004

Pj.Kasi Anggaran Belanja Langsung

SULISTIKAWATI, S.Akt, M.Si
NIP 198706222009022003

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RENO ISLAMI, ST, M.CIO**

Jabatan : Kepala Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOFI ALDIANA, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akán mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YOFI ALDIANA, SE	RENO ISLAMI, ST, M.CIO
NIP 197711232007012004	NIP 19860320201001101O

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyusun jadwal pembahasan anggaran	- Terlaksananya kegiatan sesuai jadwal	27 OPD
2	Tersusunnya Anggaran Belanja Tidak Langsung pada APBD	- Verifikasi rekomendasi penganggaran hibah bansos	6 OPD
		- Verifikasi usulan RKA BTL	29 RKA
		- Verifikasi dan penghitungan besaran ADD, DBHP, DBHR	27 Desa

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Penyusunan Perubahan APBD	Rp	63.410.000
2.	Sosialisai Peraturan Kepala Daerah tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp	-
	Total	Rp	63.410.000

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Kabid Anggaran

YOFI ALDIANA, SE
NIP 19771123 200701 2 004

Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

RENO ISLAMI, ST.M.CIO
NIP. 19860320 201001 1 010

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANAFFRY RIDO ISMANTO, S.Kom**

Jabatan : Kepala Seksi IKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YOFI ALDIANA, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YOFI ALDIANA, SE	ANAFFRY RIDO ISMANTO, S.Kom
NIP 197711232007012004	NIP 19850319200902100 4

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Aplikasi penyusunan anggaran	Aplikasi yang dapat dipergunakan dlm penyusunan anggaran	1 Aplikasi

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Sosialisasi Peraturan Penganggaran Daerah dan Pelaksanaan Penyerahan DPA	Rp	3.791.100
2.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Keuangan Daerah	Rp	77.200.000
	Total	Rp	80.991.100

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Kabid Anggaran

YOFI ALDIANA, SE
NIP 19771123 200701 2 004

Kasi Informasi Keuangan Daerah

ANAFFRY RIDO ISMANTO, S.Kom
NIP. 19850319 200902 1 004

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESISMON, S.Kom,M.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AFRIDARMAN, SE**

Jabatan : Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
AFRIDARMAN, SE	**DESISMON, S.Kom, M.Kom**
NIP 197307102003121004	**NIP 197110231997031003**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyajian LKPD tepat waktu	Tersedianya laporan BMD OPD	
2	Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD	Persentase kesesuaian pencatatan dan pelaporan BMD sesuai aturan	
3	Pengelolaan BMD sesuai aturan	Penyampaian data laporan BMD perpriode tepat waktu	
4	Tindaklanjut LHP Pemeriksaan BMD	Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP BMD oleh Pemeriksaan BPK	

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Pelaksanaan	Rp	59.860.500
2.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Rp	8.213.100
3.	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	Rp	27.280.000
4.	Pelelangan Barang Milik Daerah	Rp	19.964.500
5.	Penyusunan dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Kota Sawahlunto	Rp	10.771.570
6.	Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah	Rp	29.356.000
7.	Pembayaran Kewajiban Sewa Tanah dan Gedung yang digunakan Oleh Pemko Sawahlunto	Rp	459.412.625
	Total	Rp	614.858.295

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

AFRIDARMAN, SE
NIP 19730710 200312 1 004

Kabid Aset

DESISMON, S.Kom, M.Kom
NIP. 19711023 199703 1 003

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AFRINALDI, S.Sos**

Jabatan : Pj.Kepala Seksi Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DESISMON, S.Kom, M.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
DESISMON, S.Kom, M.Kom	AFRINALDI, S.Sos
NIP 197110231997031003	NIP 198204232009011005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Penatausahaan BMD	- Penyampaian laporan BMD tepat waktu - Pencatatan BMD sesuai dengan aturan	

KEGIATAN		ANGGARAN
1. Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah	Rp	29.356.000
Total	**Rp**	**29.356.000**

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Kabid Aset

DESISMON, S.Kom, M.Kom
NIP 197110231997031003

Pj.Kasi Penatausahaan (Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan) Aset

AFRINALDI, S,Sos
NIP 198204232009011005

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESMAINI, SE, M.Si**

Jabatan : Pj.Kepala Seksi Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DESISMON, S.Kom, M.Kom**

Jabatan : Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
DESISMON, S.Kom, M.Kom	DESMAINI, SE, M.Si
NIP 19711023199703 1003	NIP 19810504 200701 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyusunan dan Verifikasi RKBMD dan RKPBMD	Daftar kebutuhan RKBMD dan RKPBMD	95%
2	Penyusunan standarisasi harga berdasarkan jenis dan tipe barang	Data harga barang	1 buku
3	Penetapan status pengguna BMD	Barang yang ditetapkan status penggunanya	1 buku
4	Kerjasama Pemanfaatan Aset Pihak Ketiga	Aset pihak ketiga yang dimanfaatkan Pemerintah Kota	95%

	KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Penyusunan dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Kota Sawahlunto	Rp	10.771.570
2.	Pembayaran Kewajiban Sewa Tanah dan Gedung yang digunakan Oleh Pemko Sawahlunto	Rp	459.412.625
	Total	**Rp**	**485.792.195**

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Kabid Aset

DESISMON, S.Kom, M.Kom
NIP 197110231997031003

Pj.Kasi Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset

DESMAINI, SE, M.Si
NIP 19810504 200701 2 002

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YUDASKAR, S.Sos**

Jabatan : Pj.Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AFRIDARMAN, SE**

Jabatan : Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
AFRIDARMAN, SE	YUDASKAR, S.Sos
NIP 197307102003121004	NIP 197110182003121004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan PAD khususnya dari PBB-P2 dan BPHTB	Tercapainya Target PBB-P2 dan BPHTB	31 Desember

KEGIATAN		ANGGARAN	
1.	Penyusunan dokumen data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP	Rp	18.902.700
2.	Verifikasi dan pengentrian Data Objek dan Subjek PBB-P2 dan BPHTB	Rp	131.065.000
3.	Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB online	Rp	7.350.000
4.	Intensifikasi Pemungutan PBB Serta Pembekalan Kolektor PBB - P2	Rp	55.176.000
	Total	Rp	212.493.700

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Pj. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

AFRIDARMAN, SE
NIP 19730710 200312 1 004

Pj.Kepala Bidang PBB & BPHTB

YUDASKAR, S.Sos
NIP 197110182008121004

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VERA SILVIA, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YUDASKAR, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YUDASKAR, S.Sos	VERA SILVIA, SE, M.Si
NIP 197110182003121004	NIP. 19841004 200902 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Optimalisasi, monitoring dan penagihan PBB-P2	Tercapainya Target PBB-P2 dan BPHTB	90%

	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Intensifikasi Pemungutan PBB Serta Pembekalan Kolektor PBB - P2	Rp	55.176.000
	Total	**Rp**	**55.176.000**

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Pj.Kepala Bidang PBB & BPHTB

YUDASKAR, S.Sos
NIP 197110182003121004

Kasi Pelayanan dan Penagihan

VERA SILVIA, SE, M.Si
NIP 198410042009022010

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIMAS ANDRE PRAYUDHI, S.Kom**

Jabatan : Kepala Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YUDASKAR, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
YUDASKAR, S.Sos	DIMAS ANDRE PRAYUDHI, S.Kom
NIP 197110182003121004	NIP 19850603200803100 1

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Optimalisasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB-P2	- Jumlah SPPT	26.904 Lembar SPPT
2	Optimalisasi verifikasi dan penilaian BPHTB	- Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi	
		- Realisasi BPHTB	90%

KEGIATAN		ANGGARAN
1. Penyusunan dokumen data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP	Rp	18.902.700
2. Verifikasi dan pengentrian Data Objek dan Subjek PBB-P2 dan BPHTB	Rp	131.065.000
3. Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB online	Rp	7.350.000
Total	Rp	157.317.700

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Pj.Kepala Bidang PBB & BPHTB

YUDASKAR, S.Sos
NIP 197110182003121004

Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan

DIMAS ANDRE PRAYUDHI, S.Kom
NIP 19850603200803100l

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKA NURDIN, SE, MM**

Jabatan : Pj.Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AFRIDARMAN, SE**

Jabatan : Pj.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
AFRIDARMAN, SE	RIZKA NURDIN, SE, MM
NIP 197307102003121004	NIP 197910122009012006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Optimalisasi PAD	Tercapainya Target PAD	31 Desember

KEGIATAN		ANGGARAN
1. Penyusunan database wajib pajak dan retribusi daerah	Rp	1.872.000
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rp	39.344.000
3. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pendapatan	Rp	-
4. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Rp	61.068.600
Total	Rp	102.284.600

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Pj.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

AFRIDARMAN, SE
NIP 19730710 200312 1 004

Pj.Kepala Bidang Pendapatan

RIZKA NURDIN, SE, MM
NIP 19791012200901 2006

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRI NOVITA, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Pendataan Analisa dan Pengembangan Pendapatan dan Penetapan Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIZKA NURDIN, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIZKA NURDIN, SE, MM	FITRI NOVITA, SE, M.Si
NIP 197910122009012006	NIP 198202012003122003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Optimalisasi Pendataan dan Penetapan PAD	- Jumlah objek pajak yang didata dan ditetapkan - Terlaksananya pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi daerah	90%

KEGIATAN		ANGGARAN
1. Penyusunan database wajib pajak dan retribusi daerah	Rp	1.872.000
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rp	39.344.000
3. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pendapatan	Rp	-
Total	Rp	41.216.000

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Pj.Kepala Bidang Pendapatan

RIZKA NURDIN, SE, MM
NIP 197910122009012006

Kasi Pendataan, Analisa dan Pengembangan Pendapatan dan Penetapan

FITRI NOVITA, SE, M.Si
NIP 198202012003122003

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARMAYENNI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RIZKA NURDIN, SE, MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
RIZKA NURDIN, SE, MM	DARMAYENNI, S.Sos
NIP 197910122009012006	NIP 196403181986032006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Optimalisasi, monitoring dan penagihan PAD	Tercapainya Target PAD	95%

KEGIATAN	ANGGARAN	
1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Rp	61.068.600
Total	**Rp**	**61.068.600**

Sawahlunto, 2 Nopember 2020

Pj.Kepala Bidang Pendapatan

RIZKA NURDIN, SE, MM
NIP 197910122009012006

Kasi Penagihan

DARMAYENNI, S.Sos
NIP 196403181986032006